

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

(Studi Pada Tata Cara Lelang Pengelola Parkir Di Tepi Jalan Umum di Dinas
Perhubungan Kabupaten Sukoharjo)

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ABDUL AZIZ
NIM. 145030100111090



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018

MOTTO

Mengia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian.
Karena kematian memisahkanmu dari dunia sementara mengia-nyiakan
waktu memisahkanmu dari Allah SWT.

-Imam Bīn Al-Qayīm-



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir
Di Tepi Jalan Umum (Studi Pada Tata Cara Lelang
Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas
Perhubungan Kabupaten Sukoharjo)

Disusun oleh : Abdul Aziz

NIM : 145030100111090

Fakultas : Ilmu Administrasi

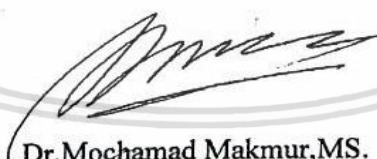
Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 3 September 2018

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing


Dr. Mochamad Makmur, MS.
NIP. 19511028 198003 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18 September 2018
Jam : 08.00 – 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Abdul Aziz
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun
2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Pada
Tata Cara Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan
Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo)


Dan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS
MAJELIS PENGUJI

Ketua

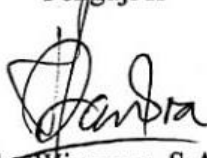

Dr. Mochamad Makmur, MS.

NIP. 19511028 198003 1 002

Penguji I


Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Penguji II


Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP
NIP. 2011078512141001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO.20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 3 September 2018



Nama : Abdul Aziz
NIM : 145030100111090



Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya:

“kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah setiap orang punya waktunya masing-masing? Seperti yang Bapak Suryadi sampaikan, bahwa sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai. Baik itu selesai tepat waktu, maupun tidak tepat waktu.

Lebih dari itu, hasil karya yang sederhana ini ku persembahkan kepada dua insan terhebat di muka bumi, yang dengannya aku labuhkan doa dalam setiap sujudku

Ayah dan Ibu

Kalianlah alasan atas segala keberhasilan yang aku raih. Terimakasih atas dukungan, kepercayaan, serta kasih sayang yang tak terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembbar kertas persembahan ini. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia.

RINGKASAN

Abdul Aziz, 2018, **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Pada Tata Cara Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo)**, Komisi Pembimbing: Dr.Mochamad Makmur,MS. 151 Hal + xv

Salah satu bentuk otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan dalam menjalankan pemerintahan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo dengan potensi pendapatan yang cukup besar. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 pelaksanaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilimpahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga melalui sistem lelang. Hal ini untuk memudahkan Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam mengelola sedikitnya 400 titik parkir yang tersebar di 12 rayon/wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Gap yang nampak pada penelitian ini, terlihat dari *Standar Operational Procedure* (SOP) yaitu Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan lelang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan mengambil fokus pada implementasi kebijakan publik. Fokus tersebut ialah Implementasi Kebijakan Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Sukoharjo, meliputi; a) Komunikasi antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan lelang dan komunikasi pengelola dengan Dinas Perhubungan, b) Sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, wewenang, informasi dan sarana prasarana Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan, c) Disposisi atau ketersediaan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kebijakan, d) Struktur birokrasi Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan lelang parkir sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP), serta faktor pendukung dan penghambat yang dianalisa berdasarkan cerita yang disampaikan oleh informan. Data peneliti peroleh melalui wawancara dan dokumentasi lapangan. Analisis data yang digunakan ialah analisis data menurut pendapat Edward III.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 yang menjadi dasar dan SOP pelaksanaan lelang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini sangat disayangkan karena kualitas sumberdaya yang dimiliki sudah berkompeten dan mampu melaksanakan kebijakan lelang dengan baik. Selain itu, penyebaran informasi lelang perlu dimaksimalkan untuk menjangkau peserta lelang yang memenuhi kriteria untuk bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Lelang Pengelolaan Parkir

ABSTRACT

Abdul Aziz, 2018, **the Implementation of Regent Regulation Number 54 Year 2012 about the Guidelines for Implementation of Parking Service Levies on Roadside of Public Roads (Study on Bidding Procedure of Parking Organizer in the Roadside of Public Roads at Transportation Department of Sukoharjo Regency)**, Supervisor: Dr.Mochamad Makmur,MS. 151 Hal + xv

One form of regional autonomy is the management of regional finances. Based on Law Number 33 Year 2004 about the Balancing of Financial between the Central Government and Regional Government, explained that one of the financial sources to financing the regional government task is Local Own-source Revenue. Parking levies for the vehicle which parked on the side of the public road are one of the sources of regional income of Sukoharjo Regency with considerable revenue potential. Based on the Regent's Regulation Number 54 of 2012, the implementation of public road parking service levies is delegated to the third parties through an auction system. This system aim to simplify the performance of Transportation Department of Sukaharjo Regency as the person in charge of public road parking service levies in managing at least 400 parking points spread over 12 regions in Sukoharjo Regency. The gap that found in this research is the Standard Operational Procedure (SOP), namely the Regent's Regulation Number 54 of 2012 as the basic foundation for auction policy implementation.

This research are using descriptive types with a qualitative approach and taking focus on implementation of public policy. The focus is on the Implementation of Auction Policy on Public Road Parking Managers by the Transportation Department in Sukoharjon Regency, includes: a) Communication between involving actors in the implementation of auction policy and managerial communication with the Transportation Department, b) Resources which are includes human resources, authority, information and infrastructure facilities of the Transportation Department in implementing policies, c) Disposition or availability of the Transportation Service to implement policies, and d) The bureaucratic structure of the Transportation Agency in implementing the parking auction policy in accordance with the standard operating procedure (SOP), as well as the supporting and inhibiting factors that were analyzed based on the stories submitted by the informants. Researcher's data obtained through interviews and field documentation. Data analysis used is a data analyst from the theory of Edward III.

The results of this study indicate that the Bupati Regulation No. 54 of 2012 which is the basis and SOP for auction implementation does not have a strong legal basis. This is very unfortunate because the quality of the resources they have is competent and able to carry out the auction policy properly. In addition, dissemination of auction information needs to be maximized to reach bidders who meet the criteria for collaboration with the Transportation Agency.

Keywords: Policy Implementation, Parking Management Auction

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Impementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Pada Tata Cara Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Mochamad Makmur, MS. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan baik secara teknis, teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Joko Waluyo selaku Sekretaris Dinas Perhubungan, Bapak Marjono selaku Kepala UPTD Dinas Perhubungan, Bapak Yudha selaku Staff UPTD Dinas Perhubungan, Ibu Harjanti selaku staff Dinas Lingkungan Hidup yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi, data pendukung serta motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak Drs.Moh.Soleh dan Ibu Siti Nur Cahyo selaku orang tua dari penulis yang tiada hentinya mendo'akan dan memberikan dukungan

moral maupun materi kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

8. Kakak dan adikku tersayang, Riana Nur A. dan Zaenal OI Kechiel atas do'a dan motivasinya kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
9. Sebelas keluarga kecilku di Malang "*Pengurus Ha-Ryan*" Ryan D.F, Hafshah Destika, Dianti Puspa, Anisa N., Ayudia Lesta, Riski Alvina, Osvaldo Sativa, Khetimareta, Alfathansyah, Rekha Kurnia, dan Bella Savitri W. yang selalu ada dan terus memberikan *support* dalam penyusunan skripsi.
10. Ketiga mentor terspesialku Fitriasari, Ryan D.F, dan Hanang Ilham yang selalu memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi.
11. Sahabat-sahabatku "*Rempongers*" Magismita, Ilham, Mia, Rosa dan Adit, yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi.
12. keluarga Pengembangan Mahasiswa Humanistik 2017 yang telah menjadi keluarga kecil yang asik dengan segala kelucuannya.
13. Keluarga besar Humanistik yang telah menjadi rumah kedua dan keluarga yang hangat.
14. Arek Basecamp Skuter yang selalu menemani hari-hari peneliti dengan push rank ML bareng.
15. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 24 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik	14
1. Pengertian Administrasi Publik	14
2. Fungsi-Fungsi Administrasi Publik	15
B. Kebijakan Publik	16
1. Pengertian Kebijakan Publik	16
2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik	19
3. Formulasi Kebijakan Publik	20
C. Implementasi Kebijakan Publik	23
1. Model Implementasi Kebijakan Publik	25
2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	27
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	28
4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan	30
D. Otonomi Daerah.....	31
1. Tujuan Otonomi Daerah	32
2. Prinsip Otonomi Daerah	33
E. Retribusi Daerah.....	35
1. Pengertian Retribusi Daerah	35
2. Obyek Retribusi Daerah	36
F. Lelang	41
1. Pengertian Lelang	42
2. Jenis-Jenis Lelang	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Instrumen Penelitian	52
G. Analisis Data	53
H. Keabsahan Data	55

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	58
1. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo	58
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	65
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	68
1. Implementasi Kebijakan Lelang Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum	68
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	95
C. Pembahasan	104

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	142

DAFTAR PUSTAKA	143
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Relisasi PAD sektor parkir tepi jalan umum Kabupaten Sukoharjo....	6
2.	Daftar pengelola retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.....	7
3	Luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Keadaan Tahun 2015.....	62
4	Jumlah Transportasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 – 2014 dan 2016.....	64
5	Susunan keanggotaan panitia lelang pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupten Sukoharjo tahun anggaran 2018.....	76
6	Pengelola lahan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013-2015.....	99
7	Pengelola lahan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2016 dan 2017.....	100
8	Pengelola lahan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.....	101
9	Pembagian wewenang panitia lelang parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.....	115

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	54
2.	Peta Kabupaten Sukoharjo.....	61
3	Peta Wilayah/Rayon Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Sukoharjo.....	69
4	Kotak Suara Penawaran Lelang Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.....	80
5	Peserta Lelang Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.....	98
6	Pelaksanaan Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.....	126

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1.	Dokumentasi Penelitian.....	146
2.	Surat Izin Penelitian.....	148
3.	Curriculum Vitae.....	150



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sistem desentralisasi di Indonesia dimulai pada masa orde baru, pada masa ini pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut diperkuat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara menyeluruh agar terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur. Menurut Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh terhadap pelaksanaan pemerintahannya.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2002:46) bahwa tujuan diselenggarakannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat bebas berkreasi dalam rangka membangun daerahnya masing-masing, tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya otonomi daerah diharapkan daerah lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraannya. Seperti halnya dalam proses pembangunan pemerintah daerah dibutuhkan peran aktif dari masyarakat, hal ini terjadi karena masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Sehingga mampu membuka peluang memajukan daerah, dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah ataupun kepada publik.

Salah satu bentuk keleluasaan pemerintah daerah dalam mengatur sendiri daerahnya adalah dalam hal pengelolaan keuangan. Menurut Yulianti (2001:11)

Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting, terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan atau kemandirian daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber penerimaan keuangan sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki setiap daerah tersebut. Sumber-sumber penerimaan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan lain-lain Pendapatan yang sah. Dari sumber-sumber penerimaan tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu penerimaan daerah yang memiliki kontribusi penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo (2002:132) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah,

hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, penyediaan dana yang bersumber pada PAD seyogyanya harus mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan hemat, sehingga tidak menurunkan standard pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan senantiasa meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah riil yang dimiliki, terutama dari sektor pajak dan retribusi sebagai komponen penyumbang PAD terbesar. Namun harus diketahui bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor/impor.

Dengan demikian, daerah harus diberi kewenangan serta mempunyai kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri sehingga cukup

memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Salah satu sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah menurut Suparmoko (1974:49) adalah merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada Negara dimana bisa atau dapat dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Pendapat tersebut didukung oleh Brotohadihardjo (1995:51) yang mengemukakan bahwa pada umumnya pengertian retribusi berhubungan dengan prestasi kembalinya adalah langsung, sebagai pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, objek retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah yang akan dikaji lebih lanjut adalah retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo, yaitu retribusi jasa umum.

Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Sukoharjo diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah. Salah satu retribusi jasa umum yang potensial untuk digali pemerintah dalam upaya mendongkrak pendapatan asli daerah adalah retribusi parkir di tepi jalan umum, yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan ini mempunyai peranan yang cukup besar

dalam menyumbang PAD di Kabupaten Sukoharjo. Berikut disajikan data hasil pendapatan retribusi sektor parkir Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 1. Realisasi PAD Sektor Parkir Tepi Jalan Umum Kab. Sukoharjo

No	Tahun Anggaran	Pendapatan Sektor parkir
1.	2017	Rp. 796.200.000
2.	2016	Rp. 546.758.554
3.	2015	Rp. 517.054.000
4.	2014	Rp. 495.249.000
5.	2013	Rp. 452.350.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan retribusi daerah di sektor parkir di tepi jalan umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. pada tahun 2013 pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp.452.350.000 dan pada tahun 2017 pendapatan retribusi parkir di tepi jalan melonjak ke angka Rp.796.200.000. Meskipun nilai lelang yang diperoleh setiap tahun mengalami peningkatan, hal itu bukan menjadi jaminan akan baiknya pelayanan parkir yang diberikan. Pasalnya masih ditemukan pelanggaran serta kesemrawutan pelayanan pengelolaan parkir yang menjadi masalah serius yang berimbas pada PAD yang dihasilkan. Dikutip dari Jawapos.com, Joko sebagai Ketua PKL mengatakan kemacetan yang terjadi di daerah Alun-alun Sukoharjo karena pengelolaan parkir yang tidak rapi dan hampir semua juru parkir (jukir) menarik tarif parkir lebih tinggi dari perda yang ditetapkan.

Menjadi salah satu penopang dana dalam PAD, dalam implementasinya Dinas Perhubungan tidak turun langsung ke lapangan untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Dijelaskan pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, bahwa pelaksanaan parkir di tepi jalan umum di serahkan pengelolaannya pada pihak ke tiga melalui sistem lelang. Pihak ke tiga merupakan orang pribadi bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota TNI/POLRI maupun Badan Usaha dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) yang dinyatakan sah sebagai wajib retribusi setelah ditetapkan menjadi pemenang oleh Panitia Lelang yang selanjutnya disebut pengelola. Adapun daftar pemenang lelang/pengelola parkir di tepi jalan umum Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar pengelola retribusi parkir di tepi jalan umum Kab. Sukoharjo Tahun Anggaran 2017

Tahun 2017	No	Rayon	Kecamatan	Plafon	Pengelola/CV
	1	I	Kartasura dan Gatak	Rp.200.000.000	Joko/CV.Barokah Putra Lestari
	2	II	Grogol dan Baki	Rp.269.050.000	Novita/CV.Positive Thinking
	3	III	Sukoharjo dan Bendosari	Rp.260.100.000	Parwanto/CV.Adhi Cipta Mandiri
	4	IV	Mojolaban dan Polokarto	Rp.42.050.000	Triyanto/CV.Usaha Bersama
	5	V	Nguter,	Rp.25.000.000	Ngadiyo/CV.Damas

			Tawangsari, Bulu, Weru		Putra
--	--	--	---------------------------	--	-------

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Tabel diatas menjelaskan bahwa parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sukoharjo di bagi perwilayah yang terdiri dari satu atau lebih kecamatan yang disebut rayon. Hal itu dilakukan untuk memudahkan Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan memantau sistem parkir yang dilakukan oleh pengelola nantinya. Diketahui bahwa setiap rayon yang dilelangkan memiliki nilai yang berbeda, hal itu berdasarkan pada seberapa besar potensi parkir yang dimiliki dalam rayon tersebut. Semakin besar potensi parkir di rayon tersebut, maka semakin besar pula nilai diperebutkan oleh peserta lelang. Dapat dilihat bahwa rayon 2 yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu Grogol dan Baki memiliki nilai lelang tertinggi dengan angka Rp.269.050.000, sedangkan pada rayon 5 yang terdiri dari 4 kecamatan memiliki nilai lelang yang rendah dengan angka Rp.25.000.000. Perlu diketahui bahwa dalam satu rayon hanya bisa dikelola oleh satu pengelola parkir, namun satu pengelola diperbolehkan untuk mengelola lebih dari satu rayon parkir dengan catatan memenuhi syarat dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan.

Aturan dalam penyelenggaraan lelang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Pada pasal 1 disebutkan bahwa kegiatan lelang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan dilaksanakan di Balai Lelang. KPKNL hampir tersebar di seluruh propinsi dan kota-kota besar di Indonesia, hal itu untuk menjamin terlaksananya proses lelang sesuai dengan prosedur yang ada

serta untuk optimalisasi dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun ada beberapa daerah yang belum terdapat KPKNL/Balai Lelang, oleh karenanya dalam Bab II Permenkeu No. 27/PMK.06/2016 dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang mengelola parkir di tepi jalan umum dengan sistem lelang, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 pada Bab VI pasal 17 bahwa pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi dengan cara dilelangkan kepada pihak ketiga. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Marjono selaku Kepala UPTD Perparkiran saat ditemui menjelaskan, kebijakan melelang parkir diambil karena sumber daya manusia aparatur yang ada dalam instansi Dinas Perhubungan tidak mencukupi untuk mengelola sedikitnya 400 titik parkir yang terbagi dalam tujuh rayon (wilayah) yang tersebar di sudut Kabupaten Sukoharjo.

Kontrak kerjasama dalam pengelolaan parkir ditepi jalan umum yang terjalin antara Dinas Perhubungan dengan pengelola melalui sistem lelang ini dapat dikategorikan sebagai kerjasama antara instansi pemerintah dengan badan hukum/pihak ketiga/swasta. Hubungan kerjasama ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Pada Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas

nama pemerintah daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Hukum. Sementara, pengelola yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan selama lebih dari 5 tahun ini adalah dari badan usaha CV. Menurut KUHD status hukum CV bukan merupakan badan hukum, oleh karenanya Dinas Perhubungan seharusnya tidak menjalin kerjasama dengan para pengelola yang berstatus hukum CV. Mengingat bahwa Kabupaten Sukoharjo yang berstatus kabupaten berkembang, untuk menunjang perencanaan transportasi yang baik diperlukan manajemen parkir yang merupakan sub bidang transportasi jalan dan harus dikelola secara baik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Pada Tata Cara Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implemetasi kebijakan lelang pengelola parkir oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan lelang pengelola parkir oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Sukoharjo.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan mendasarkan pada rumusan permasalahan, maka dalam penelitian ini mengharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai implementasi kebijakan lelang pengelola parkir dan sebagai pengembangan Ilmu Administrasi Publik Khususnya Implementasi Kebijakan Publik.
 - b. Sebagai sumbangan bahan referensi bagi calon peneliti berikutnya yang mempelajari fenomena yang sama.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai realitas lelang pegelola parkir yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

- b. Memberikan informasi bermanfaat yang dapat dijadikan acuan, pertimbangan bagi pengambil keputusan, terutama dalam menangani permasalahan dalam bidang lelang parkir.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini. Secara garis besar penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori atau temuan ilmiah dari buku-buku yang relevan dan berkaitan dengan judul penelitian. Adapun teori yang dipakai adalah Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Implementasi kebijakan, dan Lelang.

BAB III : METODE PENELITIAN

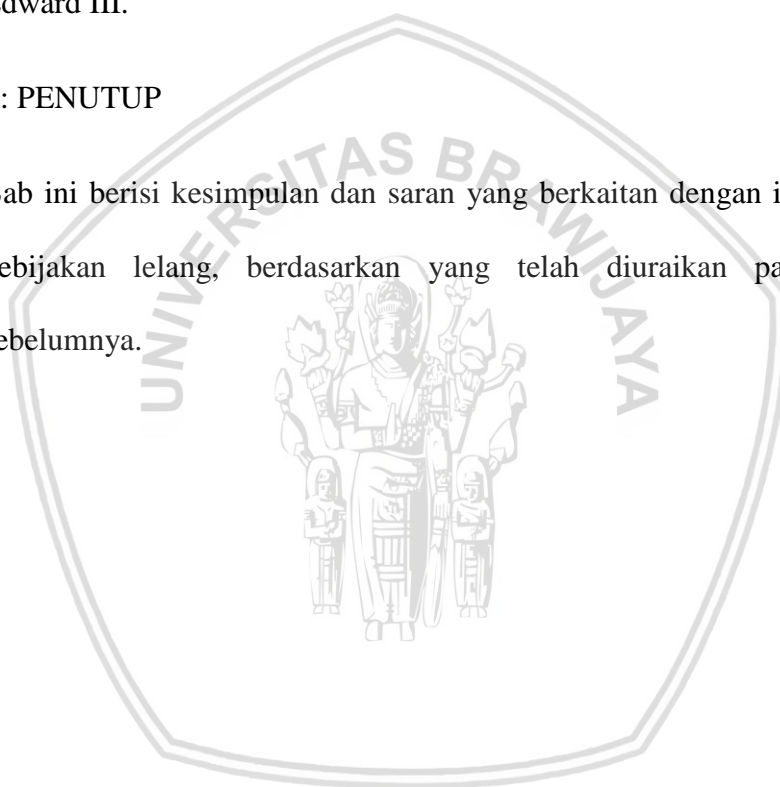
Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran dan sejarah singkat Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, penjabaran data tentang kebijakan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum serta analisis dan interpretasi secara detail dengan menggunakan teori implementasi dari Edward III.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan implementasi kebijakan lelang, berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Konsep administrasi publik sudah masuk di Indonesia sejak dari dulu. Seperti yang dikemukakan oleh Pasolong (2008: 7) bahwa administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara. Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi dan interpretasi tentang administrasi public, maka perlu diberi pembatasan atau definisi sebagai berikut.

Menurut Caiden dalam Sukidin (2009), mengungkapkan bahwa administrasi publik adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat. Sedangkan menurut Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro dalam Pasolong (2008: 8) mendefinisikan administrasi publik adalah:

- a. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
- b. Meliputi tiga cabang pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka;
- c. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.

Dari beberapa definisi administrasi publik diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan serta memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Terlebih dalam definisi yang dikemukakan Nigro dan Nigro terutama pada poin ketiga menunjukkan bahwa peran atau keterlibatan administrasi public dalam proses politik yaitu peran untuk merumuskan kebijakan publik.

2. Fungsi-Fungsi Administrasi Publik

Menurut Tjokroaminoto yang dikutip oleh Manurung (2010: 112) mengemukakan bahwa ada tiga fungsi administrasi publik, yaitu:

- a. Formulasi Kebijakan

Fungsi formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program atau strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan amat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera. Konsistensi tersebut mencakup konsistensi antara waktu atau generasi, antar sector dan wilayah, antar tingkat pemerintahan dan antar unit pemerintahan.

b. Pengaturan atau Pengendalian Unsur-Unsur Administrasi

Unsur-unsur administrasi yang perlu dikelola ialah organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut. Pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi tidak lain ialah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kapasitas administrasi publik. Membaiknya kapasitas administrasi publik diukur dari kemampuan merespon perkembangan eksternal yang mencakup perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan perkembangan-perkembangan internasional.

c. Penggunaan Dinamika Administrasi

Dinamika administrasi meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan komunikasi. Jika pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik, maka penggunaan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Menurut Thomas R. Dye (1981) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil kebijakan tersebut, dan apa akibat dari kebijakan tersebut. Selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi demi teratasinya suatu persoalan publik.

Easton (1969) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Selanjutnya, Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) dengan mendayagunakan berbagai instrumen (baik kelompok, individu maupun pemerintah) untuk mengatasi persoalan publik..

Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan sikap yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Munculnya suatu kebijakan berangkat dari adanya serangkaian tuntutan (aspirasi dan kondisi obyektif seseorang atau kelompok orang), yang mungkin dapat murni kepentingan publik, namun dapat juga merupakan hasil dari sebuah usaha (rekayasa) yang dilakukan oleh elit yang kemudian akhirnya menjadi suatu program pencapaian tujuan, nilai, dan praktek yang terarah.

2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

David Easton menyatakan bahwa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan lain sebagainya. Mereka-mereka inilah yang menurutnya, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dari sistem politik dan dianggap oleh sebagian besar warga, sistem politik tersebut merupakan pihak yang bertanggungjawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi ciri-ciri kebijakan publik diantaranya:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, melainkan pula diikuti

dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.

- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalakkan program perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan akan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Berdasarkan ciri-ciri kebijakan publik yang telah disampaikan diatas, dapat diketahui bahwa suatu kebijakan tidaklah disusun secara tidak sengaja, akan tetapi suatu kebijakan itu disusun oleh para elit politik dalam rangka memenuhi struktur pemerintahan demi menjaga tujuan suatu pemerintah.

3. Formulasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat

di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan dan proses-proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, sebuah kebijakan publik terkadang mempunyai sifat penekanan yang tegas dan memaksa sifat inilah yang tidak membedakan antara organisasi pemerintahan dan swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Dalam pemahaman ini kebijakan publik umumnya harus dilegalisasi dalam bentuk hukum, karena jika suatu kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum akan dianggap lemah dan tidak efektif. Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan yang dilakukan dengan melalui beberapa tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn dalam (Budi Winarno, 2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lainnya ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih

dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

C. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang pelaksana kebijakannya melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010: 87).

Kamus Webster (Wahab, 2005: 64) merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”. Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2005: 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam penerapan atau pelaksanaan kebijakan dengan berbagai metode dan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat dampak atau perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para implementor.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy maker* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*Street Level Bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya untuk kebijakan makro, usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa.

Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Ripley dan Franklin (Subarsono, 2010: 89) menulis sebagai berikut.

“Implementation process involve many important actor holding diffuse and competing goals and expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of goverment programs that require perticippation from numerous layers and units of goverment and who are affected by powerful factors beyond their control”.

Sebuah kebijakan tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan berjalan lancar karena terdapat beberapa faktor penentu yang dapat mempengaruhinya yaitu faktor penentu pemenuhan kebijakan dan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan. Faktor pemenuhan kebijakan terdiri dari respeknya anggota

masyarakat pada otoritas dan kepuasan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya sanksi hukum, adanya kepentingan publik, adanya kepentingan pribadi, dan masalah waktu (Agustino, 2008: 157). Sedangkan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan terdiri dari adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, tidak adanya kepastian hukum, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, dan adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum (Agustino, 2008: 160).

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan diantaranya saling berinteraksi satu sama lain. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III (1980).

1. Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Implementasi Sistem Rasional (Top-Down)

Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan top down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau: “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”. Masih menurut Parsons (2006), model rasional ini berisi gagasan bahwa

implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.

b. Implementasi Kebijakan Bottop Up

Model implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (top down). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. model bottop up adalah model yang memandang proses sebagai sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Masih menurut Parsons (2006), model pendekatan bottop up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif bottop up adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1) Idealized policy

Pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.

2) Target groups

Bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102). Menurut Teori Implementasi Kebijakan Edward (Subarsono, 2010: 90), faktor yang mendukung implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yaitu:

- a. Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. sumberdaya tersebut berupa sumberdaya manusia, wewenang, informasi, dan sarana prasarana.
- c. Disposisi, yaitu sikap atau kemauan dari implementor dalam melaksanakan kebijakan
- d. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedures* atau *SOP*).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang jelas baik antar individu maupun lembaga yang terkait, pemenuhan sumberdaya yang dibutuhkan, perilaku para implementor yang baik, serta struktur birokrasi yang dinamis, artinya tidak kaku atau berbelit-belit.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994: 149-153).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundan-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendorong pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. (Bambang Sunggono, 1994: 158).

D. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain pengertian otonomi daerah sebagaimana disebutkan diatas, kita juga dapat menelisik pengertian otonomi daerah secara harfiah. Otonomi daerah berasal dari

kata otonomi dan daerah. Dalam Bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Hossein (2000) dalam Khairul Muluk (2007:2) menyampaikan bahwa dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat. Adapun Hossein (2000) dalam Khairul Muluk (2007:9) menegaskan tentang Indonesia sebagai negara kesatuan tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat “*staat*” juga. Kekuasaan yang dimiliki daerah untuk menentukan arah kebijakan tanpa intervensi pemerintah pusat membawa perubahan signifikan pasca orde baru.

Dengan demikian otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu kewenangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya untuk mewujudkan kemandirian daerahnya. Melalui otonomi daerah masyarakatnya memiliki kemampuan untuk lebih leluasa membangun daerahnya sendiri melalui potensi yang dimiliki daerahnya.

1. Tujuan Otonomi Daerah

Diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia tentunya memiliki tujuan tertentu. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan harapan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, menjaga keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang baik antara pusat dan daerah maupun antara daerah itu sendiri dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan suatu pelayanan public dan untuk memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan adanya tujuan otonomi daerah tersebut akan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah sehingga untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Prinsip Otonomi Daerah

Widjaja (2007:7-8). Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya pertimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Menurut

penjelasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konsitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkat kemandirian daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah.
7. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dipemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Diterapkannya prinsip-prinsip otonomi daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dalam hal peningkatan kebutuhan masyarakat di daerah pada khususnya. Dengan demikian penyelenggaraan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan berjalan dengan demokratis dan adil. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Sehingga setiap daerah memiliki kewenangan utuh atas penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan tetap bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. Namun, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan pemerintah pusat sebagai pemantau dan pengawas setiap kegiatan dan kebijakan dari pemerintah daerah.

Seiring dengan prinsip otonomi daerah penyelenggarannya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Maka dari itu pemerintah daerah harus mampu melaksanakan prinsip tersebut untuk membangun daerahnya agar dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam daerah tersebut. Pemerintah daerah wajib untuk memberikan fasilitas yang berupa peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

E. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut pendapat Suparmoko (1974:49) Retribusi merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada Negara dimana bisa atau dapat dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Pendapat tersebut didukung oleh Brotohadihardjo (1995:51) yang mengemukakan bahwa pada umumnya pengertian retribusi berhubungan dengan prestasi kembalinya adalah langsung, sebagai pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah. Selain itu menurut Kurniawan et al (2006:145) retribusi daerah

merupakan penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan dibagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.

Sehingga retribusi daerah adalah pembayaran barang atau jasa atas prestasi atau nilai tukar suatu barang atau jasa yang diberikan oleh suatu daerah baik langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah tersebut. Pelayanan yang diberikan berupa tersedianya fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat. Selain itu retribusi dan pajak memiliki perbedaan satu sama lain, dimana retribusi adalah pembayaran langsung yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah dengan mendapatkan secara langsung prestasi yang diinginkan seperti dalam hal jasa atau izin tertentu.

2. Objek Retribusi Daerah

Menurut Kurniawan et al (2006:145) Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan menurut Kurniawan et al (2006:146) Jasa umum terdiri dari pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan, yang tidak termasuk jasa umum yakni jasa urusan umum pemerintahan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis-jenis retribusi diatas tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Menurut Kurniawan et al (2006:147) Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum tidak bersifat pajak dan tidak bersifat retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang/pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b) Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi

Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Sedangkan menurut Kurniawan et al (2006:146) Jasa usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki/diakui oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit. Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Menurut Kurniawan et al (2006:147) Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

- b. Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun Jenis retribusi perizinan tertentu meliputi 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3) Retribusi Izin Gangguan; 4) Retribusi Izin Trayek; dan 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan. Sedangkan menurut Kurniawan et al (2006:146) menyatakan bahwa:

“Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan, dan pengawasan. Maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah. Sehingga, terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah. Pengajuan izin tertentu oleh badan usaha milik daerah, tetap dikenakan retribusi karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengajuan izin oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu”.

Adapun kriteria pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberin izin tersebut cukup besar. Sehingga, layak dibiayai dari retribusi perizinan.

F. Lelang

Menurut sejarahnya lelang berasal dari bahasa latin “auctio” yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Para ahli menemukan di dalam literature Yunani bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum masehi. Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam perundang-undangan sejak tahun 1908, yaitu dengan berlakunya *Vendu Reglement*, Stbl. 1908 Nomor 189 dan *Vendu Instructie*, Stbl. 1908 Nomor 190. Peraturan dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang sifatnya *Lex Specialis*. Kekhususan (spesialisasi) lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang transparan/keterbukaan dengan pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh seorang Pejabat Umum, yaitu Pejabat Lelang yang mandiri.

Perkembangan hukum belakangan ini seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Kepailitan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan membuktikan ekspektasi masyarakat dan pemerintah yang semakin besar terhadap lelang. Hal ini jelas menunjukkan bahwa meskipun sistem lelang yang diatur dalam *Vendu Reglement* termasuk salah satu peraturan lama warisan Belanda, sistem dan konsep dasarnya sebenarnya cukup baik dalam mendukung sistem hukum saat ini.

1. Pengertian Lelang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin oleh Pejabat Lelang. Sedangkan yang dimaksud melelangkan atau memperlelangkan adalah :

- a. Menjual dengan jalan lelang;
- b. Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang;
- c. Memborongkan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lelang tidak dibatasi pada penjualan barang-barang saja, tetapi meliputi juga pemborongan pekerjaan.

Menurut Sudiono (2001: 52) lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang tertinggi, dan dipimpin oleh Pejabat Lelang. Melelangkan dan memperlelangkan adalah aktivitas menjual dengan jalan lelang, memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang dan memborongkan

pekerjaan. Pengertian ini mengandung makna bahwa lelang tidak dibatasi pada penjualan barang-barang saja, tetapi meliputi juga pemborongan pekerjaan. Berdasarkan pendapat Sudiono dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan suatu barang/benda, baik bergerak atau tidak bergerak yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau menurun untuk mencapai dan menyetujui harga yang diinginkan.

Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 pada pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dalam penjualan barang secara lelang ini terdapat aspek-aspek positif, yaitu:

- a. Aspek kompetitif, yaitu dalam pelaksanaan lelang ini terjadi suatu persaingan bebas dalam hal pengajuan penawaran;
- b. Aspek built in control, yaitu adanya pengawasan langsung oleh masyarakat atau publik;
- c. Aspek obyektivitas, yaitu bahwa pelaksanaan lelang ini dipimpin oleh seorang pejabat lelang yang tidak memihak.

2. Jenis-Jenis Lelang

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah suatu

instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah KPKNL mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL bertujuan untuk mengurus dan menyelesaikan piutang negara baik itu melalui penjualan secara lelang maupun penyelesaian diluar lelang. KPKNL yang sangat besar pengaruhnya dalam pencapaian target pelaksanaan lelang dan berpengaruh pula dalam pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL berarti suatu penjualan yang merupakan sarana perdagangan barang yang dijual melalui atau dihadapan Pejabat Lelang.

Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun Jenis-jenis lelang yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 27/PMK.06/2016 pasal 5 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan khususnya oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL), yaitu:

a. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi Pengadilan negeri, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Fiducia, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Barang Sitaan pasal 45 KUHAP, Lelang Eksekusi, barang temuan, Lelang Eksekusi barang rampasan,

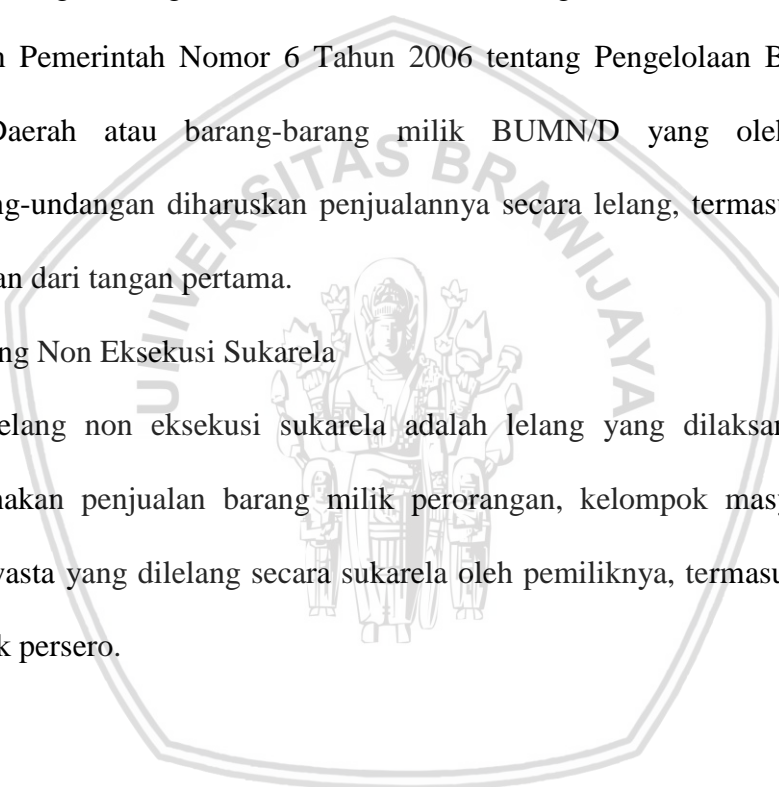
Lelang Eksekusi barang yang dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, dan lelang Eksekusi Gadai.

b. Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang non eksekusi wajib adalah lelang yang dilaksanakan untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah atau barang-barang milik BUMN/D yang oleh Peraturan Perundang-undangan diharuskan penjualannya secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan dari tangan pertama.

c. Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang yang dilaksanakan untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2005: 55). Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena dengan jenis penelitian deskriptif peneliti dapat menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada secara aktual serta mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2001:4) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengertian metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan mengenai sejauh mana implementasi kebijakan lelang pengelola parkir di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu juga membahas tentang kondisi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan lelang tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka pendekatan ini adalah kualitatif.

Bagdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau orang ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penulis berusaha memberikan gambaran secara tepat dan jelas mengenai sifat-sifat atau keadaan, situasi kondisi, gejala atau perkembangan gejala dalam hubungan antara obyek penelitian dengan gejala kemasyarakatan lainnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan dan merupakan garis besar dari pengamatan penelitian. Pada hakikatnya, penelitian kualitatif ini dilakukan bukan dengan sesuatu hal yang kosong, tetapi dilakukan karena adanya suatu pandangan mengenai masalah tertentu. Fokus penelitian sangatlah penting dikarenakan dalam hal ini digunakan untuk membatasi pembahasan agar sesuai dengan permasalahan dan tidak meluas ke hal-hal diluar permasalahan dengan menitikberatkan pada tingkat kepentingan, visibilitas, etis, jelas, signifikan. Dalam pandangan penelitian kualitatif, Sugiyono (2008:207) menyatakan bahwa gejala dari suatu objek bersifat holistic (menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi

keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.

Pembatasan fokus akan sangat penting berkaitan dengan masalah maupun data yang akan dikumpulkan dan diolah untuk dianalisa. Maka agar penelitian ini nantinya lebih terarah dan mudah dalam pencarian data, batasan yang menjadi fokus berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini, adalah:

1. Implementasi Kebijakan Lelang Pengelola Parkir oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan teori Edward III, yaitu :
 - a. Komunikasi antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan lelang dan komunikasi pengelola dengan Dinas Perhubungan.
 - b. Sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, wewenang, informasi dan sarana prasarana Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan.
 - c. Disposisi atau ketersediaan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kebijakan.
 - d. Struktur birokrasi Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan lelang pengelola parkir sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP).
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum, meliputi :

a. Faktor internal

Faktor ini disebabkan berada didalam (internal) Dinas Perhubungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo sendiri sebagai implementor kebijakan.

b. Faktor eksternal

Faktor ini disebabkan berada diluar (eksternal) Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai implementor kebijakan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sukoharjo. Peneliti mengambil lokasi penelitian di daerah ini dengan pertimbangan bahwa Peraturan Daerah tentang lelang pengelola parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sukoharjo sudah ada sejak tahun 2012, selama kurun waktu 5 tahun terakhir pelaksanaan lelang pengelola parkir di Kabupaten Sukoharjo sampai tahun 2017, peneliti ingin menganalisa sejauh mana implementasi dari sistem lelang tersebut mengingat Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten yang masih dalam tahap berkembang yang tidak memiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan proses lelang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Perhubungan.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, karena UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan sebagai dinas yang terkait dan mempunyai wewenang dalam

menangani permasalahan pelaksanaan lelang pengelola parkir di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Pemerintah Daerah sebagai pengawas hukum bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah menyangkut jenis data yang dapat memberikan dan mengungkapkan informasi tentang permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Berdasarkan jenis datanya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Data primer ini diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan beberapa responden, meliputi :

- a. Pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
- b. Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- c. Anggota panitia lelang .
- d. Peserta lelang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup informasi yang telah dikumpulkan dan hanya relevan dengan permasalahan yang ada. terdapat beberapa keunggulan menggunakan data sekunder, yaitu:

- a. Data sekunder sudah tersedia;
- b. Untuk mendapatkan data sekunder, waktu dan biaya yang dibutuhkan lebih sedikit daripada waktu untuk mendapatkan data primer;
- c. Biasanya data sekunder dapat diperoleh secara gratis.

Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui:

- a. Dokumen-dokumen penting dari UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- b. Beberapa jurnal dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data di lapangan. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan beberapa literatur, artikel, jurnal, undang-undang dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung kelapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan melibatkan staff UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan dan staff Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

b. Observasi

Yaitu cara memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data-data berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan dengan melakukan pendekatan-pendekatan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang sudah tersedia di lokasi penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud saran/benda. Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Salah satu ciri peneliti kualitatif adalah memasukan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Hal ini berpengaruh terutama dalam proses wawancara dan analisa data.

2. Pedoman wawancara (*Interview Guide*)

Yaitu berupa daftar pertanyaan yang di ajukan kepada informan penelitian dan biasanya digunakan oleh peneliti sebagai kerangka dasar dalam mengadakan wawancara dengan aktor yang terlibat sebagai sumber data dalam penelitian ini.

3. Catatan Lapangan (*Field Note*)

Yaitu merupakan catatan untuk mencatat hasil-hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.

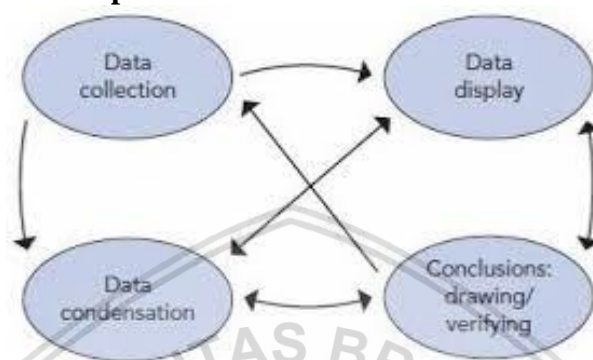
Sedangkan alat-alat seperti kertas serta alat-alat tulis sebagai alat pelengkap untuk membantu pencatatan di lapangan guna kelancaran dalam penelitian.

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisa interaktif. Proses analisis model ini mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Sesuai dengan penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14) mengemukakan bahwa ada empat bentuk analisis yaitu: kondensasi data, penyajian

data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Alur kegiatan analisa interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14) adalah sebagai berikut:

Gambar 1.
Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles, Huberman dan Sadana, 2014

Penjelasan dari gambar diatas terkait komponen analisis data menurut Miles Huberman dan Sadana (2014: 14) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data. Tahap pengumpulan data disini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang melibatkan aktor, aktivitas dan terjadinya fenomena.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang di dapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus menerus selama penelitian. Kondensasi dapat dilakukan dengan cara menjabarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian secara lengkap dan terperinci. Laporan lapangan disederhanakan dan dipilih hal-hal yang penting atau pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari polanya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data

sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh di lapangan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya disajikan baik dalam bentuk tabel maupun bentuk kalimat atau uraian.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam kegiatan analisis. Dari hasil data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisa untuk dapat ditarik kesimpulannya. Penarikan kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung, karena makna yang muncul dari data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dibuktikan dengan triangulasi data. Bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Peneliti melaksanakan konfirmasi jawaban suatu informan dengan membandingkan dengan jawaban informan lain atau dengan jawaban yang diperoleh dari data observasi atau data dokumen. Menurut Sugiyono (2014:121) keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi empat bagian, yaitu:

1. Credibility

Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data dalam hasil penelitian kualitatif dilakukan melalui triangulasi data, dimana triangulasi data dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara melalui teknik yang berbeda dan berbagai waktu untuk memberikan data yang valid dan kredibel.

2. Transferability

Merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil, oleh karena itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, maka peneliti harus memberikan uraian yang jelas dan terperinci.

3. Dependability

Dalam penelitian kualitatif, dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang mana untuk menguji dependabilitas dibutuhkan auditor independen atau pembimbing dalam mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian seperti bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

4. Confirmability

Dalam penelitian kualitatif, confirmabilitas sama dengan dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Ang mana menguji confirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan dan apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmabilitas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo

a. Sejarah Singkat

Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Karesidenan Surakarta pernah merupakan Daerah Istimewa yang dikenal dengan Solo Ko (Kasunanan) dan Mangkunegaran Ko (Mangkunegaran). Wilayah Mangkunegaran meliputi daerah Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan sebagian kota Solo. Sedangkan wilayah Kasunanan meliputi daerah Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali, dan Kabupaten Kutha Surakarta. Sukoharjo pada waktu itu hanya merupakan suatu daerah tepi dengan pimpinan pemerintahan tertinggi adalah “Wedono”, tak ubahnya dengan Bekonang, dan Kartasura. Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, dan Kartasura ini menjadi satu masuk wilayah Kabupaten Kutha Surakarta, di bawah pemerintah Kasunanan.

Pada tanggal 27 Mei 1946 Kabupaten Karanganyar secara defacto menyatakan diri lepas dari pemerintahan Mangkunegaran. Hal ini kemudian diikuti oleh Kabupaten Boyolali dan Sragen yang juga menyatakan diri lepas dari pemerintahan Kasunanan. Kabupaten Kutha Surakarta kemudian diputuskan pindah ke Sukoharjo. Bersamaan dengan munculnya gerakan anti Swapraja dan berbagai dukungan untuk membentuk pemerintah Kota Surakarta, akhirnya dengan suatu kebulatan

tekad dari “Wong Solo”, mereka menyatakan berdirinya Pemerintah kota Surakarta yang lepas dari Kasunanan pada tanggal 16 Juni 1946. Tanggal ini kemudian menjadi hari lahir Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta. Kemudian disusul keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli 1946 lingkungan Karesidenan Surakarta dibentuk suatu daerah baru dengan kota Surakarta yang dikepalai oleh seorang Walikota.

Dengan keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli 1946, maka secara formal Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran dipandang sudah tidak ada lagi, dan wilayah-wilayahnya untuk sementara menjadi wilayah Karesidenan Surakarta. Ini berarti wilayah Karesidenan Surakarta terdiri dari bekas wilayah-wilayah Mangkunegaran yaitu Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri, serta bekas wilayah Kasunanan yaitu Kabupaten Klaten, Sragen, Boyolali, dan Sukoharjo (Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, Kartasura), ditambah Kotamadya Surakarta. Keadaan ini mengilhami para pemimpin pada waktu itu untuk membentuk kabupaten barudi luar kota Surakarta agar ketiga kawedanan (Sukoharjo, Bekonang, Kartasura) dapat dibina dalam satu naungan pemerintah kabupaten. Kemudian secara spontan KNI Daerah Surakarta menunjuk KRMT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo untuk menjadi Bupati.

Atas dasar tersebut di atas serta pertimbangan analisa, logis dan kronologis yang dikaitkan dengan landasan yuridis meskipun landasan yuridis itu tidak bersifat mengatur secara khusus, maka pada hari Senin Pon tanggal 15 Juli 1946, saat ditetapkannya Penetapan Pemerintah

Nomor: 16/SD tersebut ditetapkan menjadi Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo. Penetapan ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 Seri D No.2 tanggal 9 Januari 1987.

Dasar hukum Hari Lahir Sukoharjo adalah :

1. Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten diwilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 Seri D No.2 tanggal 9 Januari 1987.

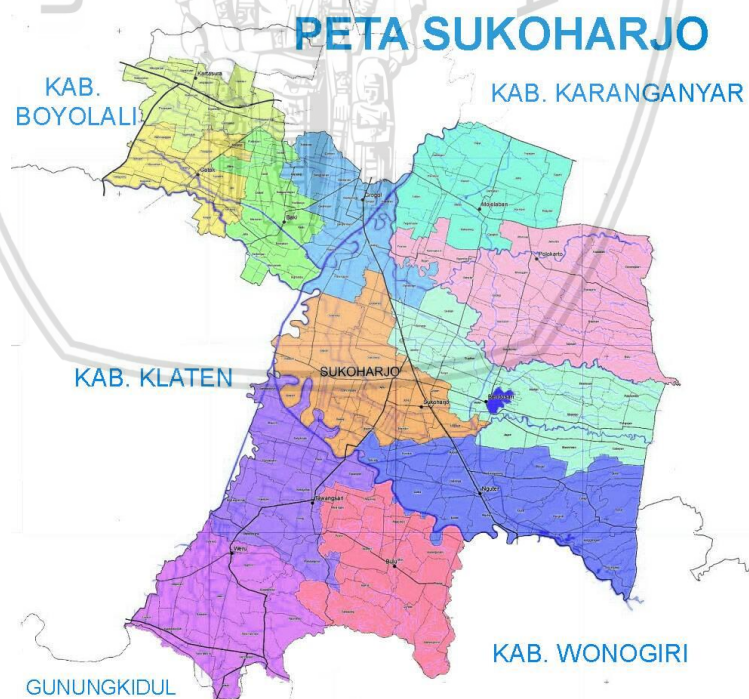
b. Batas Administratif

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak pada posisi 110° 42' 06.79" Bujur Timur — 110° 57' 33.70" Bujur Timur dan 7° 32' 17.00" Lintang Selatan — 7° 49' 32.00" Lintang Selatan.

Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
2. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Gambar 2
Peta Kabupaten Sukoharjo



Sumber: <http://portal.sukoharjokab.go.id/peta/>

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 150 desa dan 17 kelurahan, dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Bendosari yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46,67 Ha atau 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan pula luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo:

**Tabel 3. Luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo
Keadaan Tahun 2015**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase %
1	Weru	4.20	9.00
2	Bulu	4.39	9.40
3	Tawang Sari	4.00	8.57
4	Sukoharjo	4.46	9.55
5	Nguter	5.49	11.76
6	Bendosari	5.30	11.36
7	Polokarto	6.22	13.32
8	Mojolaban	3.55	7.62
9	Grogol	3.00	6.43
10	Baki	2.20	4.71
11	Gatak	1.95	4.17
12	Kartasura	1.92	4.12
Jumlah		46.67	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

Luas Kabupaten Sukoharjo ± 46.67 Ha sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo adalah lahan pertanian. Luas wilayah di Kabupaten Sukoharjo beragam, beberapa kecamatan yang tergolong memiliki luas wilayah yang besar adalah Kecamatan Polokarto yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dengan luas wilayah 6.22 Ha, kemudian disusul Kecamatan Bendosari dan Nguter. Ketiga kecamatan

tersebut merupakan bagian selatan dari Kabupaten Sukoharjo. Kemudian kecamatan yang memiliki luasan wilayah yang kecil diantaranya Kecamatan Kartasura dengan luas wilayah 1.92Ha yang merupakan bagian dari utara kabupaten dan berbatasan dengan Kota Solo.

Seperti kota-kota lain, Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai slogan yaitu Sukoharjo Makmur. Sukoharjo MAKMUR juga mempunyai arti atau kepanjangan dari Maju Aman Konstitusional Mantap Unggul Rapi. Selain itu Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai nama sebutan (julukan) yang cukup terkenal, antara lain: Kota Makmur, Kota Tekstil, Kota Gamelan, The House of Souvenir, Kota Gadis (perdagangan, pendidikan, industri, dan bisnis), Kabupaten Jamu, Kabupaten Pramuka, serta Kabupaten Batik.

c. Transportasi

Jalan merupakan sarana pengangkutan di dalam kegiatan perekonomian. Dengan semakin meningkatnya pembangunan maka sarana pengangkutan dituntut semakin baik pula. Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan dapat didistribusikan dengan lancar. Panjang jalan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014 secara keseluruhan sepanjang 683,72 km terbagi menjadi 25,19 km jalan negara, 53,41 km jalan provinsi, dan 605,12 km jalan kabupaten. Kondisi jalan di Kabupaten Sukoharjo terbanyak dalam kondisi baik sepanjang 336,84 km, sedangkan selebihnya dalam kondisi rusak 112,06 km, kondisi sedang 161,32 km serta kondisi rusak berat sepanjang 73,50 km. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo juga mengalami peningkatan

yang signifikan, berikut disajikan data perkembangannya dari tahun 2010 sampai 2014 dan 2016:

**Tabel 4. Jumlah Transportasi di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010 – 2014 dan 2016**

No	Bulan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2016
1	Mobil penumpang	15 378	16 903	17 987	19 148	21 752	23 752
2	Mobil beban	5715	5805	6195	7510	7901	8 633
3	Mobil bus	358	343	354	371	463	479
4	Sepeda motor	212	220	241	263	288	313
		923	805	209	042	010	857
	Jumlah	234	243	265	290	318	346
		374	856	745	071	126	723

Sumber : Satun lalu lintas Polres Sukoharjo (buku Sukoharjo dalam angka 2015 dan sukoharjo dalam angka 2016)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kepemilikan jenis kendaraan sepeda motor adalah yang paling banyak di Kabupaten Sukoharjo dengan total jumlah diatas 200 ribu per tahunnya dan pada tahun 2016 telah

mencapai 300 ribu sepeda motor. Kepemilikan Jenis kendaraan mobil penumpang juga meningkat, pada tahun 2010 sebanyak 15378 dan pada 2016 sudah mencapai 23752. Meningkatnya jumlah kendaraan sepeda motor dan mobil penumpang menjadi salah satu faktor potensi nilai lahan parkir ditepi jalan umum mengalami kenaikan.

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan administratif di bidang perhubungan;
- b. pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan perhubungan;
- c. pelaksanaan pelayanan perizinan dan pemberian rekomendasi izin di bidang perhubungan di daerah; dan
- d. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan memiliki visi, yaitu “Terwujudnya sistem transportasi yang handal di Kabupaten Sukoharjo”. Agar visi tersebut dapat terlaksana, maka ditetapkan misi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelayanan di bidang transportasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pendapatan asli daerah

- b. pengelolaan data informasi yang akurat untuk diinformasikan kepada masyarakat luas

Berdasarkan peraturan xxx pada Dinas Perhubungan, susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.

- b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, monitoring evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan. Sekretariat terdiri atas:

- 1) Subbag Perencanaan dan Keuangan
- 2) Subbag Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Lalu Lintas

Bidang lalu lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang lalu lintas. Bidang Lalu Lintas terdiri dari:

- 1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
- 2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas
- 3) Seksi Terminal

d. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang angkutan. Bidang Angkutan terdiri dari:

- 1) Seksi Angkutan Orang dan Barang
- 2) Seksi Operasi dan Pengendalian
- 3) Seksi Penyeberangan

e. Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang keselamatan. Bidang Keselamatan terdiri dari:

- 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 2) Seksi Perbengkelan

3) Seksi Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan dalam pelaksanaan teknis dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

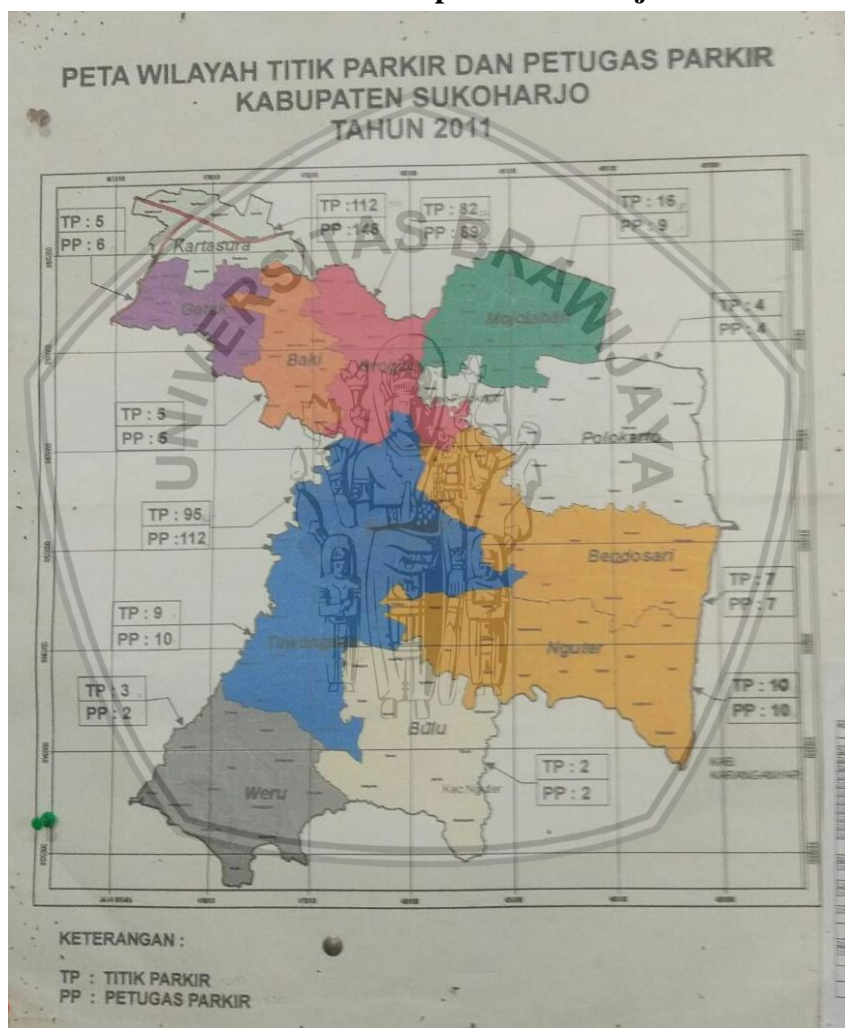
B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum

Lelang pengelola parkir di tepi jalan umum merupakan agenda tahunan Dinas Perhubungan dalam rangka menciptakan perencanaan transportasi yang baik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada BAB VI pasal 17 dijelaskan bahwa pengelolaan lahan parkir di tepi jalan umum diserahkan kepada pihak ketiga melalui sistem lelang. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 merupakan dasar dan pedoman Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kebijakan lelang yang didalamnya memuat tentang aturan dan tatacara pelaksanaan lelang. Lelang dilaksanakan pada akhir tahun sekitar bulan Oktober/November oleh panitia lelang yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perhubungan. Sebelum lelang dilaksanakan, ada tim khusus yang bertugas

untuk mensurvei potensi wilayah parkir di Kabupaten Sukoharjo. Berikut gambar pembagian peta wilayah/rayon parkir yang dilelangkan di Kabupaten Sukoharjo:

Gambar 3
Peta Wilayah/Rayon Parkir di Tepi Jalan Umum
di Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Dinas Perhubungan

Berdasarkan peta wilayah diatas, terdapat 12 rayon/lokasi parkir yang terbagi di Kabupaten Sukoharjo. 12 rayon tersebut diantaranya:

- a. Rayon I Wilayah Kecamatan Kartasura
- b. Rayon II Wilayah Kecamatan Gatak

- c. Rayon III Wilayah Kecamatan Grogol
- d. Rayon IV Wilayah Kecamatan Baki
- e. Rayon V Wilayah Kecamatan Sukoharjo
- f. Rayon VI Wilayah Kecamatan Bendosari
- g. Rayon VII Wilayah Kecamatan Mojolaban
- h. Rayon VIII Wilayah Kecamatan Polokarto
- i. Rayon IX Wilayah Kecamatan Nguter
- j. Rayon X Wilayah Kecamatan Bulu
- k. Rayon XI Wilayah Kecamatan Tawang Sari
- l. Rayon XII Wilayah Kecamatan Weru

Apabila potensi rayon di kecamatan belum potensial, maka rayon dapat bergabung dengan rayon/wilayah kecamatan yang lain. Hasil survei potensi yang dilakukan tim survei akan menjadi pertimbangan panitia lelang dalam menentukan besaran limit plafon yang akan dilelangkan. Setiap peserta yang mendaftar sebagai calon pengelola, harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012, peserta yang tidak memenuhi syarat dan tidak mengumpulkan berkas tidak dapat mengikuti proses lelang. Dinas Perhubungan tidak membatasi calon peserta hanya dari wilayah Kabupaten Sukoharjo, akan tetapi juga terbuka untuk calon peserta yang berdomisili di luar Kabupaten Sukoharjo.

Lelang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Dinas Perhubungan diawali dengan pembukaan dan pembacaan tata tertib oleh panitia kemudian dilanjutkan proses lelang dengan memasukan surat penawaran oleh peserta

kedalam kotak penawaran. Peserta dengan penawaran tertinggi disetiap rayon dinyatakan sebagai pemenang lelang. Acara lelang diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan tanda tangan perjanjian/MoU antara pemenang lelang dengan pihak Dinas Perhubungan. Implementasi kebijakan lelang lahan parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut pada pembahasan dibawah ini dengan menggunakan teori Edward III.

- a. Komunikasi antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan lelang dan komunikasi pengelola dengan Dinas Perhubungan.

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi oleh komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*). Komunikasi antar pelaksana implementasi diperlukan agar memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu yang baru dibuat oleh organisasi kepada pihak yang menjadi subyek dari program maupun kebijakan tersebut. Dengan berjalannya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka pelaksanaan yang baik dan tercapainya tujuan peraturan daerah dapat tercapai.

Komunikasi yang terjalin dengan baik dapat mengantarkan informasi dengan baik pula. Seperti berjalan baiknya komunikasi yang dijalankan antar aktor terkait pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012

Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Joko selaku ketua panitia lelang sebagai berikut:

“Selama ini komunikasi yang dibangun baik-baik saja antar pihak, termasuk ketika kita mengadakan penertiban dengan pihak keamanan dalam hal ini koramil, tentara, polisi dan satpol PP kita libatkan melalui SK Bupati ketika mengadakan penertiban juru parkir yang nakal. Artinya panitia yang ditugaskan oleh kepala dinas ini sudah paham tentang perkara lelang, sehingga koordinasi antar panitia dan stakeholder lain pun juga lebih mudah dan terarah. Saya sebagai ketua panitia pun juga selalu menekankan disetiap rapat bahwa panitia harus memiliki frame yang sama dan kesepahaman tentang tujuan apa yang hendak dicapai. Bias-bias terjadi karena ada beberapa persepsi yang berbeda terhadap pemahaman serta potensi nilai yang ada di kabupaten sukoharjo. seperti yang saya utarakan diawal bahwa potensi parkir di wilayah kabupaten sukoharjo ini cukup besar dengan range nilai hampir 2 milyar. Akan tetapi adanya pengeluaran-pengeluaran kepada ongkos parkir, pengelola, serta pihak pihak yang sudah disebutkan membuat nilai riil parkir berkurang. Hal ini yang menurut kami cukup riskan menjadi perdebatan di internal panitia, oleh karenanya harus disamakan dahulu persepsi kepada internal maupun stakeholder yang terlibat sehingga semua pihak bisa memahami ketika ada perbedaan yang jauh antara survei potensi dengan target nilai PAD sektor parkir. (wawancara tanggal 3 juli 2017 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo)”

Penjelasan diatas didukung juga dengan pernyataan Ibu Harjanti selaku anggota panitia lelang perwakilan dari Pemerintah Daerah sebagai berikut:

“Selama saya menjadi panitia lelang membantu dinas perhubungan, komunikasi saya dengan panitia itu pas rapat aja sama pelaksanaan. Mereka temen-temen panitia yang terlibat ini terutama dari pihak dishub nya sendiri, pasti adalah orang-orang yang berkompeten dan paham betul tentang lelang ini kan. Hal itu dibuktikan pada saat acara lelang, sedikit sekali kesalahan-kesalahan teknis yang dilakukan oleh panitia. Akan tetapi kan yang namanya masalah itu pasti ada ya, belum lagi ini adalah perkara lelang, namun masalah kebanyakan bukan berasal dari kesalahan panitia. Misal pendaftar harus berstatus hukum cv dan tidak boleh

perseorangan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh cv tersebut seperti melampirkan NPWP dan SIUP seperti yang tertera di peraturan. Ketika ada peserta yang tidak lengkap dalam melampirkan berkas dan tidak memenuhi syarat maka panitia harus tegas untuk menolak keikutsertaannya sebagai peserta lelang. (wawancara tanggal 5 Juli di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo)”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan lelang, komunikasi yang dibangun panitia adalah komunikasi secara langsung. Berada dalam satu wilayah kantor mempermudah proses komunikasi yang dilakukan oleh panitia. Komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan staff dari Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukoharjo juga secara langsung ketika rapat persiapan lelang dan pelaksanaan lelang. Ibu Harjanti selaku anggota panitia menjelaskan bahwa diluar agenda tersebut, beliau tidak pernah melakukan komunikasi melalui Handphone (Hp) maupun media lainnya. Dengan demikian, peneliti melihat bahwa bentuk komunikasi yang terjalin antara panitia adalah komunikasi langsung. Panitia pelaksana kebijakan hampir tidak pernah melakukan komunikasi dan berkoordinasi secara tidak langsung (Hp), karena mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan, sampai pada evaluasi semuanya dilaksanakan di wilayah kantor dinas perhubungan kabupaten sukoharjo.

Berakhirnya masa kerja panitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perhubungan adalah dimenangkannya seluruh rayon yang dilelangkan serta penandatanganan berita acara pelaksanaan lelang. Tugas dan tanggung jawab panitia hanya sampai pelaksanaan lelang, setelah nama-nama pemenang lelang didapatkan, yang akan mengambil alih tanggung

jawab selanjutnya untuk berkomunikasi dengan pengelola adalah UPTD Perparkiran. Bapak Joko selaku ketua panitia memberikan penjelasan mengenai komunikasi yang dibangun antara UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan dengan pengelola sebagai berikut:

“Jadi pengelola yang sudah menang akan dikumpulkan , diminta partisipasi dan komitmen nya untuk membantu dishub dalam mengelola parkir dan mencapai target sesuai dengan penawaran mereka dalam lelang dan kita menganggap mereka sebagai mitra seperti layaknya seorang ayah dan anak yang saling membutuhkan dengan membangun hubungan seperti itu diharapkan bersama sama bisa mencapai target pendapatan yang menjadi perjanjian diawal dan kita juga ikut memberikan pembinaan pada pengelola. Untuk pelimpahan wewenang dari dishub kepada pengelola sendiri tertulis dalam berita acara, sehingga berita acara itu juga yang menjadi komitmen perjanjian antara dishub dengan pengelola sebagai pemenang lelang. jika nantinya dikemudian hari ada masalah dalam pengelolaan parkir, maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola dan dinas perhubungan. Sebenarnya jukir itu kan menjadi karyawannya pengelola, tapi kita tidak bisa lepas tanggung jawab ketika ada problem atau jukir yang nakal terkait dengan pelaksanaan. Menjadi tanggung jawab dinas sebagai pembina dari jukir. Meskipun secara langsung mereka merupakan anak buah dari pengelola. (wawancara tanggal 3 Juli 2017 di Kantor Dinas Perhubungan)”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa penyerahan wewenang dari dinas perhubungan kepada pemenang lelang adalah pada saat berakhirnya acara lelang dengan ditandatanganinya berita acara yang sudah disertakan nama-nama pemenang lelang. Pihak dinas perhubungan mengibaratkan kerjasama dengan pengelola sebagai mitra seperti layaknya hubungan seorang ayah dan anak yang saling membutuhkan dengan harapan pencapaian target yang ditetapkan bisa maksimal.

Komunikasi yang dibangun tidak hanya antara panitia dengan panitia, tetapi juga kepada pengelola yang menjadi mitra Dinas Perhubungan dalam mengelola lahan parkir di tepi jalan umum selama masa kontrak satu tahun per 1 Januari sampai 31 Desember. Dengan berakhirnya masa kerja panitia lelang, maka tanggung jawab dalam menjalin komunikasi kepada pengelola adalah UPTD Perparkiran. Dalam prakteknya, komunikasi dilakukan dengan pengelola ketika terjadi masalah dilapangan yang menyangkut juru parkir (jukir) sebagai karyawannya pengelola, pembayaran angsuran lelang, dan sosialisasi yang diadakan Dinas Perhubungan kepada pengelola dan jukir

- b. Sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, wewenang, informasi dan sarana prasarana Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan

Sumberdaya merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, tanpa sumberdaya yang memadai proses implementasi tidak akan berjalan optimal. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo juga memiliki sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam wawancara dengan Bapak Joko dan Ibu Harjanti pada bulan juli 2018, beliau menginformasikan bahwa Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan khususnya dalam lelang pengelola parkir di tepi jalan umum memiliki sumberdaya, yaitu:

1) Sumberdaya Manusia/Staff

UPTD Parkir merupakan bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan lelang. Terdapat 6 staff yang bertugas di UPTD Parkir termasuk Kepala UPTD. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko Waluya selaku ketua lelang, beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan membentuk panitia lelang yang beranggotakan 7 orang. Terdiri atas 1 orang dari Bagian Pendapatan Badan Keuangan Daerah, 1 orang dari bagian hukum pemerintah daerah dan 5 orang dari internal dinas perhubungan. Bapak Joko menjelaskan bahwa perwakilan dari bagian pendapatan BKD berperan sebagai konsultan besaran nominal yang akan dilelangkan, sedangkan perwakilan dari bagian hukum Pemerintah Daerah meninjau proses pelaksanaan lelang apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut susunan panitia lelang pengelola parkir tahun 2017:

Tabel 5. Susunan keanggotaan panitia lelang pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupten Sukoharjo tahun anggaran 2018

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1	Djoko Indrianto,S.Sos	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Penasehat Lelang

2	Drs. Joko Waluyo	Sekretaris pada Dnas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua
3	Marjono, ST	Kepala UPTD perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris
4	Drs. Rudiyanto, M.Si	Kasi Perubahan Status Hukum pada Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Sukoharjo	Anggota
5	Retno Widiyanti, B.SH	Kasubag Bantuan Hukum dan Pengkajian Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
6	Nanik Winarni, S.Sos	Kasubag TU Unit Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
7	Waluya	Staff pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota

Sumber: Arsip UPTD Perparkiran Kabupaten Sukoharjo

Bapak Joko juga menjelaskan bahwa tidak ada syarat khusus untuk menjadi panitia lelang dan tidak diatur dalam peraturan bupati no 54 tahun 2012, beliau menambahkan bahwa satu-satunya syarat yang harus dipenuhi adalah sudah menjadi PNS (wawancara tanggal 3 Juli 2017 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan). Senada dengan Bapak Joko, Ibu Harjanti selaku anggota dari Bagian Hukum Pemda menjelaskan bahwa tidak ada aturan dari pemerintah yang mengatur tentang berapa jumlah personil panitia lelang dan kualifikasi apa saja yang harus dimiliki (wawancara tanggal 5 Juli 2017 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup). Akan tetapi beliau menegaskan bahwa jumlah panitia harus ganjil, hal itu untuk memudahkan pengambilan keputusan dengan musyawarah sehingga didapatkan perolehan pendapat setengah lebih dari satu. Keanggotaan panitia lelang berakhir ketika telah didapatkan semua nama-nama pemenang lelang dan ditandatangani evaluasi berita acara.

2) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung untuk melangsungkan kegiatan agar berjalan seperti yang diharapkan. Tanpa sarana dan prasarana yang mencukupi, kegiatan yang dilakukan akan sulit untuk dilaksanakan dengan optimal. Kebijakan lelang pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan, juga membutuhkan sarana dan prasarana yang

mencukupi agar kebijakan yang diimplementasikan bisa berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan berupa tempat untuk melaksanakan kegiatan, kotak penawaran untuk memasukan amplop penawaran dari peserta ketika proses lelang, LCD proyektor (tidak wajib), serta peralatan tulis untuk proses administrasi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Harjanti selaku anggota panitia lelang, beliau menjelaskan bahwa:

“selama 2x saya menjadi anggota panitia lelang, kegiatan lelang selalu dilaksanakan di rumah makan yang berada di depan dishub karena di dishub tidak memiliki ruangan/tempat yang mencukupi untuk dilaksanakan kegiatan lelang. Ini mungkin ya, karena saya juga tidak terlalu tau kegiatan lelang ditahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan lelang sebelum saya menjadi panitia juga sepertinya dilaksanakan di rumah makan itu. tapi untuk tahun ini lelang 2017 kemarin sepertinya sudah dilaksanakan di kantor dishub sendiri karena kan saya denger itu bangunan aula nya juga sudah jadi dan kemarin pas acara lelang sudah bisa ditempati disana. Untuk perlengkapan yang dibutuhkan tidak banyak ya, ada kotak penawaran untuk memasukkan amplop penawaran dari peserta. terus ada TOA, spidol dan papan tulis, sama paling kita sediain bangku ya untuk pesertanya karena ga mungkin kalo lesehan kan. (wawancara tanggal 5 Juli 2017 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup”

Dari penjelasan Ibu Harjanti dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan lelang sudah mencukupi. Sarana yang dimiliki dinas perhubungan berupa kotak penawaran, spidol, papan tulis, TOA, serta peralatan tulis sudah terawat dengan baik.

Gambar 4
Kotak Suara Penawaran Lelang Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Dinas Perhubungan

Akan tetapi dinas perhubungan tidak memiliki prasarana berupa tempat untuk melaksanakan kegiatan lelang. Pada tahun anggaran 2015 dan 2016 kegiatan menyewa tempat di rumah makan yang berlokasi tepat didepan kantor dinas perhubungan untuk melaksanakan lelang. Melihat kekurangan itu, Dinas Perhubungan mengusahakan untuk membangun ruang pertemuan sendiri dan pada tahun 2017 ruang pertemuan kantor Dinas Perhubungan selesai dibangun. Ketersediaan ruang pertemuan tersebut dimanfaatkan oleh panitia dengan sebaik-baiknya, terbukti pada tahun anggaran 2018 pelaksanaan lelang parkir sudah tidak menyewa tempat di rumah makan Anugrah, melainkan berada di ruang pertemuan di Kantor Dinas Perhubungan.

3) Wewenang

Pelaksanaan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum oleh dinas perhubungan berdasarkan peraturan bupati nomor 54 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 merupakan produk kebijakan dari Dinas Perhubungan sendiri dalam menyikapi peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kaitannya dengan peraturan yang menjadi landasan dinas perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan lelang parkir, Ibu harjanti selaku anggota panitia lelang dari pemerintah daerah menjelaskan sebagai berikut:

“itu merupakan usulan dari dishub yang diserahkan ke bagian hukum sekda. Setelah itu akan dirapatkan oleh bag hukum sekda dengan mengundang skpd terkait yang sekiranya memiliki campur tangan atau hubungan dengan kebijakan ini. Untuk materi memang berasal dari dishub, bag hukum sekda bertanggung jawab atas legal draftingnya kemudian disinkronkan dengan aturan yang lebih tinggi, kira kira apakah kebijakan ini bertentangan atau tidak. Setelah itu diklarifikasi di provinsi baru bisa ditetapkan.” (wawancara tanggal 5 juli 2018 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah disahkan oleh Bupati Kabupaten Sukoharjo dan diketahui oleh Pemerintah Provinsi. Dinas Perhubungan memiliki kewenangan penuh dalam mengelola parkir di tepi jalan umum. Dalam pelaksanaannya pengelolaan parkir di tepi jalan umum

diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga melalui sistem lelang sebagaimana yang tertulis dalam peraturan bupati nomor 54 tahun 2012 pada bab VI pasal 17.

Kegiatan lelang dilaksanakan pada akhir tahun sekitar bulan Oktober-November. Bapak Joko selaku sekretaris dinas perhubungan sekaligus ketua panitia lelang menjelaskan alur pemberian wewenang kepada panitia sebagai berikut:

“ketika pelaksanaan lelang sudah dekat, UPTD Parkir melapor kepada kepala dinas meminta ijin mengadakan kegiatan lelang untuk parkir ditepi jalan umum dengan memaparkan potensi yang sudah disurvei. oleh karenanya membutuhkan bantuan personil dari internal untuk pelaksanaannya. Untuk itu kepala dinas akan membuat SK tentang panitia lelang. Yang pertama, dari internal sendiri untuk posisi ketua panitia diampu oleh sekretaris dinas. Sekretaris panitia lelang adalah kepala uptd parkir, kemudian ditunjuk 2 orang sebagai anggota dari internal dan 2 orang dari luar dinas perhubungan yakni 1 orang dari bidang pendapatan BKD dan 1 orang dari bidang hukum pemda dengan mengajukan surat permohonan pada masing-masing instansi. (wawancara tanggal 3 Juli 2018 di Kantor Dinas Perhubungan)”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Surat Keputusan (SK) pembentukan panitia yang dikeluarkan oleh kepala dinas perhubungan merupakan pemberian kewenangan secara resmi kepada panitia untuk melaksanakan kegiatan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum. Berbekal SK kepala dinas tersebut, panitia memiliki wewenang dan otoritas untuk mengimplementasikan kebijakan lelang parkir sampai selesai. Disamping itu, penyerahan wewenang kepada pemenang lelang untuk mengelola lahan parkir adalah pada saat berakhirnya acara lelang, yaitu pada saat

penandatanganan berita acara kegiatan lelang disertai dengan penandatanganan kesepakatan (MoU) antara pihak Dinas Perhubungan dengan pemenang lelang (selanjutnya disebut pengelola).

4) Informasi

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi implementor kebijakan. informasi yang diberikan kepada pelaksana tidak boleh setengah-setengah dan harus menyeluruh terkait bagaimana pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dan data kepatuhan agar seorang implementor bertindak sesuai dengan peraturan dan memiliki etika yang baik. Berdasarkan wawancara dengan ibu Harjanti, beliau menjelaskan bahwa pemberian arahan dan gambaran tentang lelang parkir itu ketika rapat persiapan, sekitar H-satu bulan panitia semua dikumpulkan termasuk dari sekda dan BKD untuk kemudian bersama-sama diberi penjelasan oleh pimpinan (wawancara tanggal 5 Juli 2017 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup).

Informasi disampaikan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini panitia lelang pada saat rapat persiapan. Ibu harjanti menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh pimpinan adalah terkait penjelasan teknis kegiatan lelang, peraturan/tata tertib yang harus dipatuhi oleh panitia dan peserta, informasi mengenai survei potensi pendapatan sektor parkir, serta tugas dari masing-masing panitia. Disamping itu, penyampaian informasi kepada pengelola sebagai

mitra Dinas Perhubungan dalam mengelola lahan parkir di tepi jalan umum adalah ketika pertemuan pertama penandatanganan MoU dan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan satu bulan sekali oleh dinas perhubungan ke setiap rayon dengan menghadirkan pengelola dan jukir yang menjadi karyawannya.

- c. Disposisi atau ketersediaan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kebijakan

Keberhasilan dari implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sebenarnya dapat ditentukan oleh kemampuan dari para pelaku kebijakan dalam memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya kebijakan dapat diwujudkan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Harjanti selaku anggota panitia lelang dari Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

“karena bukan bagian dari dishub dan ditunjuk untuk menjadi panitia lelang pasti ada rasa takut karena ini merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Jadi setelah mendapat surat perintah untuk menjadi bagian dari panitia lelang dinas perhubungan, saya menghadap ke kepala bagian untuk sharing meminta arahan dan masukan tentang kegiatan lelang yang akan dilaksanakan dishub. Karena memang awalnya saya tidak tau menau perkara lelang parkir ini, karena ditunjuk oleh atasan ya saya harus siap. Prinsip saya adalah selalu optimis dan mau belajar. Setiap kali akan berangkat ke dishub untuk kegiatan lelang saya pasti selalu menghadap ke pimpinan dahulu untuk berkonsultasi dan meminta saran serta bertukar pendapat sekiranya ada masalah yang mungkin

terjadi dan bagaimana menyikapinya. Jangan sampai pas ditunjuk jadi panitia kita hanya diam saja, tau tau sudah acara lelang kita tidak ngerti dan hanya jadi beban untuk temen-temen panitia yang lain. (wawancara tanggal 5 Juli tahun 2018 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup)”

Dalam pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Ibu Harjanti memiliki disposisi yang kuat dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota panitia dalam mengimplementasikan kebijakan lelang meskipun beliau bukan berasal dari internal Dinas Perhubungan. Tidak jauh berbeda dengan Ibu harjanti, Bapak Joko selaku ketua panitia lelang juga memberikan tanggapannya mengenai disposisi anggota panitia lelang, sebagai berikut:

“Dalam menjalankan perintah dari pimpinan, antusiasme panitia yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan lelang bisa dikatakan cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dengan minimnya kesalahan yang dibuat dari rekan-rekan panitia, hingga akhirnya kegiatan lelang parkir bisa terlaksana dengan baik dan kondusif (wawancara 3 Juli 2018 di kantor Dinas Perhubungan).”

Pada pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa panitia yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan lelang memiliki antusiasme yang tinggi. Bapak Joko selaku ketua panitia lelang juga memiliki disposisi yang kuat dengan memberikan respon positif dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik.

Pada proses implementasi kebijakan, dinas perhubungan memiliki pedoman hukum berupa PP Nomor 32 Tahun 2011 Tentang manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas yang diperjelas dalam UU No 28 tentang Pajak dan retribusi daerah. Bentuk kesiapan kabupaten sukoharjo dalam melaksanakan retribusi

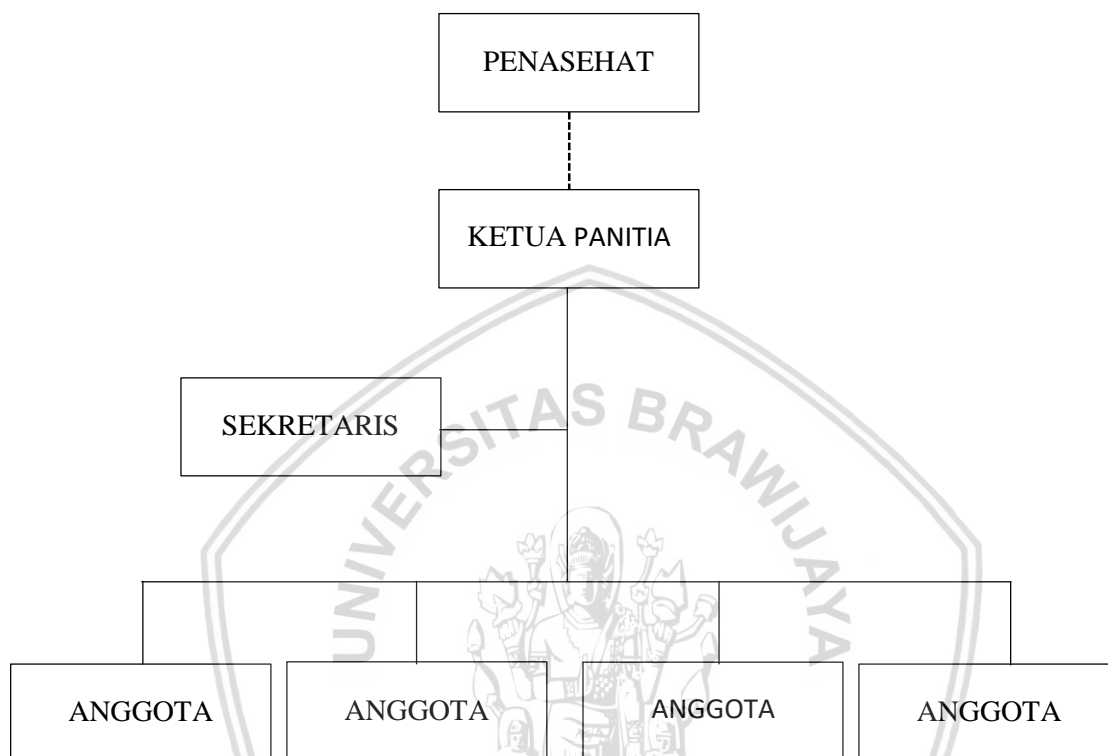
pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko selaku ketua panitia lelang, beliau menjelaskan bahwa ketika sudah mendekati akhir tahun pada bulan September-Oktober Bidang UPTD parkir akan melapor kepada Kepala Dinas Perhubungan terkait pelaksanaan lelang pengelola parkir dengan menyertakan survei potensi di setiap rayon yang akan dilelangkan. Selanjutnya Kepala Dinas akan membuat laporan pelaksanaan kegiatan lelang parkir ke Pemerintah Daerah disertai Surat keputusan Panitia Lelang. Surat keputusan panitia lelang didasarkan pada Bab VII pasal 18 Peraturan Bupati No.54 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa pelelangan dilakukan oleh panitia lelang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

- d. Struktur birokrasi Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan lelang parkir sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP).

Struktur birokrasi mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi memberikan peranan yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan atau implementasi peraturan daerah. Struktur birokrasi salah satunya memberikan kejelasan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi. Berikut

adalah struktur organisasi kepanitiaan lelang parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Kabupten Sukoharjo:



Sumber: data olahan peneliti

Adanya struktur birokrasi dapat mencegah adanya tumpang tindih tugas antar aktor yang berperan. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar operasional prosedur (SOP). Pada struktur kepanitiaan tersebut, garis hitam putus-putus menandakan sifat koordinasi dalam hal ini Kepala Dinas sebagai penasehat dengan Sekretaris Dinas sebagai Ketua Pelaksana, sedangkan garis lurus hitam diartikan sebagai garis perintah dari ketua kepada anggota dan sekretaris. Pada sebuah kebijakan yang dibuat pasti memiliki prosedur sebagai pedoman pelaksanaan dari suatu kebijakan tersebut. Pada Peraturan Bupati No. 54 tahun 2012 telah dijabarkan prosedur pelaksanaan lelang pengelola parkir

yang menjadi pedoman dinas perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan. Berikut adalah tatacara lelang pengelola parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2012:

1) Peserta Lelang

a) Peserta lelang adalah orang pribadi bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota TNI/POLRI maupun Badan Usaha dan memiliki kemampuan sumber daya sesuai dengan dokumen dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- Mengajukan Surat Permohonan Pengelolaan Parkir kepada kepala dinas;
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi yang ber badan hukum;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Memberikan uang jaminan sebesar 10% dari harga dasar yang ditetapkan.

b) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya.

2) Pengumuman dan Pendaftaran Peserta

a) Panitia lelang mengumumkan waktu dan tanggal dimulai pendaftaran, penawaran, penyerahan surat penawaran, penetapan besarnya uang jaminan, dan tanggal pelaksanaan lelang melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum

serta bila memungkinkan melalui media elektronik. Agar pengumuman secara luas dapat mencapai sasaran secara efisien dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat yang dituju.

- b) Biaya pengumuman dialokasikan dalam dokumen anggaran untuk pembiayaan kegiatan/proyek yang bersangkutan.
- c) Isi pengumuman lelang memuat sekurang-kurangnya:
 - Nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan.
 - Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli.
 - Syarat-syarat peserta lelang.
 - Tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta.
- d) Calon peserta lelang yang berminat ikut dalam pelelangan harus mendaftarkan diri kepada panitia untuk mengikuti prakualifikasi.
- e) Calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak dilarang untuk mengikuti proses lelang di propinsi/kabupaten/kota dimana pelelangan dilakukan.

3) Prakualifikasi

- a) Panitia pelelangan wajib melakukan prakualifikasi bagi calon peserta lelang yang akan mengikuti pelelangan sesuai dengan dokumen prakualifikasi yang telah diberikan kepada calon peserta lelang.

- b) Calon peserta lelang yang berminat mengikuti pelelangan wajib mengambil dokumen prakualifikasi dan mengikuti prakualifikasi yang dilakukan oleh panitia. Peserta prakualifikasi tersebut tidak boleh dipungut biaya.
- c) Pelaksanaan prakualifikasi calon peserta lelang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Panitia meneliti dan menilai data kualifikasi calon peserta lelang dengan menggunakan ketentuan sebagaimana mestinya.
 - Sertifikasi penyedia barang/jasa yang dikeluarkan asosiasi perusahaan/profesi digunakan sebagai salah satu acuan untuk memudahkan panitia melakukan prakualifikasi.
 - Panitia melakukan penelitian dan penilaian yang meliputi: Kemampuan dari segi administrasi dan finansial, kemampuan dari segi peralatan, kemampuan sumber daya manusia, pengalaman dan prestasi kerja, calon peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap prakualifikasi dicatat untuk diundang mengikuti pelelangan

4) Pelaksanaan Lelang

- a) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam Perbup Sukoharjo Nomor 54 tahun 2012 adalah sebagai berikut:
- Peminat/pemohon mendaftar kepada Panitia Lelang

- Peserta lelang mengisi formulir penawaran yang telah disediakan
 - Setiap formulir penawaran hanya berlaku untuk satu (1) rayon
 - Surat penawaran dianggap sah apabila pengisiannya dilakukan secara lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Tulisan besarnya angka penawaran sama dengan yang terbilang
 - Membubuhkan material senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - Membubuhkan tanda tangan dan nama terang serta stempel bagi Badan Usaha
 - Bagi peserta lelang yang pada saat pelaksanaan lelang masih mengelola tempat parkir di tepi jalan umum wajib melampirkan bukti pembayaran lunas atas nilai lelang tempat parkir yang dikelolanya
- b) Surat penawaran lelang dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan diserahkan kepada Panitia lelang
- c) Penyerahan surat penawaran harus melampirkan bukti penyetoran uang jaminan yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang
- d) Bagi peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang maka uang jaminan diperhitungkan sebagai setoran nilai lelang

- e) Bagi peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang, uang jaminan dapat diambil kembali.
- f) Apabila pelaksanaan lelang tidak tercapai plafon lelang, maka Panitia Lelang dapat mengulang pelaksanaan lelang paling banyak 2 (dua) kali
- g) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak tercapai plafon lelang yang telah ditentukan, maka Panitia Lelang akan berkonsultasi dengan Kepala Dinas perhubungan untuk menentukan pemenang lelang
- h) Keputusan pemenang lelang sebagaimana yang dimaksud pada point 7 tidak dapat diganggu gugat
- i) Pemenang lelang dinyatakan sah sebagai wajib retribusi setelah ditetapkan menjadi pemenang oleh Panitia Lelang yang selanjutnya disebut pengelola.

Sebelum pelaksanaan lelang, Kepala Dinas menunjuk tim dari UPTD Perparkiran untuk mensurvei potensi lahan parkir di setiap rayon dengan melihat pada lahan parkir dan nilai lelang tahun sebelumnya. Hasil survei menjadi pertimbangan panitia dalam menentukan nilai limit plafon yang akan dilelangkan nantinya. Setelah nilai limit plafon lelang ditentukan dan rundown kegiatan lelang sudah matang, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan lelang. pelaksanaan kebijakan lelang diawali dengan penyebaran informasi oleh panitia. Informasi lelang berupa surat pengumuman yang ditempatkan di papan informasi kantor dinas perhubungan dan disiarkan melalui radio lokal kabupaten sukoharjo.

Agenda selanjutnya adalah pengumpulan berkas oleh calon peserta lelang yang bertempat di ruang kerja UPTD Perparkiran. Berkas yang dikumpulkan oleh peserta kemudian akan diverifikasi oleh panitia, jika terdapat kekurangan atau ketidakcocokan berkas yang dikumpulkan maka pendaftar tidak akan bisa mengikuti pelaksanaan lelang. Perwakilan anggota panitia dari organisasi pemerintah daerah (OPD) lain yaitu Pemda dan BKD tidak ikut terlibat dalam proses pengumpulan dan verifikasi berkas. Tugas pengumpulan dan verifikasi berkas sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota panitia dari Dinas Perhubungan. Pelaksanaan lelang diikuti oleh seluruh panitia termasuk perwakilan dari OPD yang terlibat dan peserta yang dinyatakan lolos verifikasi berkas. Acara lelang diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan penjelasan umum mengenai tata tertib selama kegiatan lelang berlangsung. Setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang, yaitu pemasukan penawaran kedalam kotak penawaran oleh peserta lelang. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dalam rayon yang dipilih. Jika terdapat peserta yang menawar dengan nominal sama, maka dilaksanakan lelang ulang dengan penawar yang sama tersebut tanpa melibatkan seluruh peserta. Apabila terdapat kekosongan penawaran dalam suatu rayon yang dilelangkan, maka akan dilaksanakan lelang ulang pada rayon tersebut sampai tiga kali. Dalam tiga kali penawaran ulang masih tidak didapatkan pemenang, maka panitia akan meminta saran kepada Kepala Dinas Perhubungan sebagai penasehat. Kebijakan yang

diambil untuk menangani kekosongan penawaran adalah melakukan negosiasi kepada peserta lelang yang mempunyai track record serta pengalaman yang baik sebagai pengelola. Kedekatan wilayah peserta dengan rayon yang dinegosiasikan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan peserta yang dipilih untuk negosiasi. Negosiasi dimaksudkan agar peserta yang dipilih mau mengelola rayon yang belum dimenangkan meskipun dengan nominal limit plafon yang ditawarkan. Apabila seluruh rayon sudah mendapatkan pengelola, acara terakhir adalah penutupan dan penandatanganan berita acara pelaksanaan lelang dan penandatanganan kesepakatan (MoU) antara Dinas Perhubungan dengan pengelola.

Standar operational prosedur (SOP) ini disahkan oleh pemerintah daerah dalam Peraturan bupati nomor 54 tahun 2012. Dalam SOP tersebut dijelaskan tentang kriteria peserta lelang serta alur bagaimana lelang parkir diimplementasikan. Dalam mengimplementasikan kebijakan lelang, Dinas Perhubungan selalu berpedoman pada Peraturan Bupati ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko sebagai berikut:

“ya kegiatan lelang yang dilaksanakan dishub ini mengacu pada perbup no 54 tahun 2012 yang mengatur bahwa pengelolaan parkir ditepi jalan umum dilimpahkan kepada pihak ketiga melalui sistem lelang dan disana sudah dijelaskan tentang sop dan peraturan terkait. Jadi memang setiap kali mengadakan kegiatan kita selalu berpedoman pada peraturan peraturan yang mengikat. SOP yang ada harus ditaati karena itu merupakan kewajiban dinas sebagai tangan panjang bapak bupati dalam mengimplementasikan kebijakan. (wawancara tanggal 3 Juli 2018 di Kantor Dinas Perhubungan)”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Harjanti selaku anggota panitia lelang dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

“ya selama ini dan ketika saya menjadi panitia lelang kemarin, pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sama pemerintah. Alhamdulillah mulai dari penyampaian informasi, kriteria peserta lelang, dan alur pelaksanaan lelang semua nya bisa dijalankan dengan tertib, karena kita kan juga tidak berani untuk istilahnya melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. (wawancara tanggal 5 Juli 2018 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup)”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan lelang pengelola parkir sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diatur oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan ketertiban dari Dinas Perhubungan serta disposisi yang baik dari panitia sebagai implementor dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

- a. Faktor pendukung implementasi kebijakan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Sukoharjo

1) Kemampuan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia atau disingkat SDM merupakan faktor utama dalam menjalankan suatu kebijakan. Tanpa adanya SDM kebijakan yang direncanakan tidak akan bisa dilaksanakan. Memiliki jumlah SDM yang banyak tidak menjamin kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, akan tetapi juga dibutuhkan kompetensi dan kemauan yang tinggi yang harus dimiliki oleh seorang implementor kebijakan. Jumlah staff pada UTPD Perparkiran tidak lebih dari 6 orang dan setiap staff memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan bidangnya. Dalam hal

ini staff yang ditugaskan untuk menjadi panitia lelang dituntut untuk mampu menyelesaikan pekerjaan pokoknya sebagai staff UPTD Perparkiran tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai panitia lelang. Dalam wawancara dengan Bapak Joko selaku ketua panitia lelang, beliau menjelaskan keadaan staff yang dimiliki UPTD Perparkiran sebagai berikut:

“kegiatan lelang parkir ini sudah termasuk dalam salah satu agenda tahunan dari dinas perhubungan. memang ini kita menargetkan bahwa untuk tahun tahun kedepannya pengelolaan parkir akan kita handle sendiri tapi untuk saat ini kan belum bisa karena keterbatasan sumberdaya yang ada dan lelang menjadi alternatif untuk menjalankan kebijakan retribusi parkir ini. Staff yang ditunjuk pimpinan untuk menjadi panitia pun saya kira juga tidak sembarangan ya, meskipun tidak ada kualifikasi khusus akan tetapi penunjukan juga melihat pada kesiapan dan kompetensi dari staff nya juga sehingga saya kira menjadi panitia lelang tidak terlalu mengganggu tugas pokok sebagai staff di kantor karena itu sudah menjadi agenda rutin dinas. (wawancara tanggal 3 Juli di Kantor Dinas Perhubungan)”.

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam mengimplementasikan peraturan bupati no 54 tahun 2012 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum dinas perhubungan memiliki kendala dalam hal sumberdaya sehingga pengelolaan retribusi parkir dilimpahkan pada pihak ketiga. Pembentukan panitia melalui penunjukan langsung dari kepala dinas melihat berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh staff, sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai staff UPTD Perparkiran dan panitia lelang dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengabaikan salah satu kewajibannya.

2) Dukungan pimpinan

Pemimpin menjadi faktor pendukung yang paling penting, dimana akan menjadi faktor yang paling berpengaruh untuk mencapai keberhasilan visi dan misi suatu organisasi. Dukungan seorang pemimpin dapat membuat suatu implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien. Pengaruh dukungan pimpinan kepada bawahan akan menimbulkan sinergi yang besar untuk memotivasi bawahannya agar memiliki semangat dan loyalitas yang tinggi. Dukungan pimpinan kepada panitia dalam mengimplementasikan peraturan bupati nomor 54 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kabupaten sukoharjo terlihat dalam setiap rapat dan berhasil dilajalkannya kebijakan dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Joko selaku ketua panitia lelang sebagai berikut:

“Seperti yang sudah saya katakan diawal bahwa dalam setiap rapat saya selalu menekankan kepada panitia untuk menyamakan tujuan dahulu. Dengan memiliki frame yang sama akan memudahkan dalam berkoordinasi dan saling support dalam menjalankan kegiatan lelang ini. Pak Marjono itu kan beliau sebagai kepala UPTD Parkir sekaligus sekretaris dalam panitia lelang juga selalu berkoordinasi dengan saya, karena jangan sampai ada masalah-masalah dilapangan nantinya yang akan mengganggu karena ini urusannya dengan pengelola. (wawancara tanggal 3 Juli 2018)”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pimpinan selalu berusaha untuk memberikan motivasi dan arahan kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Faktor penghambat implementasi kebijakan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Sukoharjo

1) Peserta lelang

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dinas perhubungan dalam mengelola lahan parkir di kabupaten sukoharjo, membuat dishub harus melelangkan pengelolaan lahan parkir kepada pihak ketiga sebagai alternatif dalam mengimplementasikan kebijakan. oleh karena itu, keikutsertaan pihak-pihak yang memenuhi syarat dan berkompetensi sebagai calon pengelola parkir sangat dibutuhkan. Hal itu untuk menciptakan persaingan yang ketat dalam proses penawaran perebutan rayon parkir yang dilelangkan, sehingga nilai lelang yang ditargetkan dapat tercapai melebihi batas plafon yang ditetapkan.

Gambar 5
Peserta Lelang Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018



Sumber: Arsip UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan

Rayon/wilayah parkir di kabupaten sukoharjo menurut peraturan bupati nomor 54 tahun 2012 dibagi menjadi 12 rayon. Idealnya setiap rayon dikelola oleh satu pengelola, akan tetapi partisipasi akan peserta lelang yang dibutuhkan dinas perhubungan untuk mengelola lahan parkir di tepi jalan umum masih sangat minim. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Pengelola lahan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013-2015

Rayon	Kecamatan	Pengelola Tahun Anggaran 2013	Pengelola Tahun Anggaran 2014	Pengelola tahun anggaran 2015
I	Kartasura dan gatak	CV Ayu Widyasari	CV Kharisma	CV Aneka Usaha Mandiri
II	Grogol dan baki	CV Positive Thinking	CV Positive Thinking	CV Positive Thingking
III	sukoharjo	CV Ayu Widyasari	CV Ayu Widyasari	CV Katon Danar Utama
IV	Bendosari	CV Ayu Widyasari	Mulyono	CV Katon Danar Utama
V	Nguter	CV Ayu Widyasari	CV Ayu Widyasari	CV Damas Putra
VI	Mojolaban	CV Kharisma	CV Damas	CV Barokah

	dan Polokarto		Putra	Putra Lestari
VII	Tawang Sari, Bulu, dan weru	CV Kharisma	CV Ayu Widyasari	CV Damas Putra

Sumber: data olahan peneliti

Tabel 7. Pengelola lahan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2016 dan 2017

Rayon	Kecamatan	Pengelola Tahun Anggaran 2016	Kecamatan	Pengelola Tahun Anggaran 2017
I	Kartasura dan gatak	CV Katon Danar Utama	Kartasura dan Gatak	CV Barokah Putra lestari
II	Grogol dan baki	CV Positive Thinking	Grogol dan Baki	CV Positive Thinking
III	Sukoharjo	CV Barokah Putra Lestari	Sukoharjo dan Bendosari	CV Adhi Cipta Mandiri
IV	Bendosari	CV Barokah Putra Lestari	Mojolaban dan Polokarto	CV Usaha Bersama
V	Nguter	CV Damas Putra	Nguter, Tawang Sari,	CV Damas Putra

			Bulu, Weru	
VI	Mojolaban dan Polokarto	CV Usaha Bersama		
VII	Tawang Sari, Bulu, dan weru	CV Narendra		

Sumber: data olahan peneliti

Tabel 8. Pengelola lahan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018

Rayon	Kecamatan	Pengelola Tahun Anggaran 2018
I	Kartasura	CV Barokah
II	Grogol	CV Positive Thinking
III	Sukoharjo	Joko Apriyanto
IV	Mojolaban dan Polokarto	CV Usaha Bersama
V	Bulu, Tawang Sari, Weru	Widodo
VI	Gatak dan Baki	Aji Marga Dewantara
VII	Bendosari	Maryono
VII	Nguter	Suyatno
IX	Toko Modern Alfa Indomart	CV Damas Putra

Sumber: data olahan peneliti

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun anggaran 2013 sampai 2018 pengelola parkir yang menjadi mitra kerja dinas perhubungan

adalah badan usaha berbentuk CV dan perseorangan. Selain itu satu pihak dapat mengelola lebih dari satu rayon/wilayah parkir yang dilelangkan, hal ini membuat persaingan penawaran tidak dapat mencapai nilai yang tinggi. Selain itu tidak ada badan usaha yang berstatus badan hukum yang berpartisipasi dalam pelaksanaan lelang menjadi kendala tersendiri oleh Dinas Perhubungan. Dalam wawancara dengan Bapak Joko, beliau menjelaskan alasannya sebagai berikut:

“masalah utama yang kita hadapi adalah di sukoharjo sendiri belum ada badan hukum yang concern mempunyai spesifikasi sebagai pengelola parkir terutama di tepi jalan umum. sementara dari dinas sendiri belum mampu untuk mengelola parkir secara mandiri, memang idealnya dinas harus mempunyai petugas di setiap wilayah yang akan menjemput setoran dari tiap jukir. Namun karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki maka kita maksimalkan pada pihak ketiga yang mengikuti lelang yang kita adakan. (wawancara tanggal 3 Juli 2018)”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa partisipasi dari peserta lelang yang memenuhi syarat sebagai pengelola untuk bekerjasama dengan dinas perhubungan masih sangat minim. Sampai pada akhirnya dinas perhubungan harus memaksimalkan keterbatasan peserta yang ada.

2) Tekanan dari pihak yang berkepentingan

Dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan terdapat target group atau masyarakat yang dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan tertentu terhadap adanya kebijakan. dalam implementasi Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2012 tentang

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum juga tidak lepas dari gangguan oleh pihak yang berkepentingan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Joko selaku ketua panitia lelang sebagai berikut:

“sebelum mengadakan lelang, kita selalu mengadakan survei potensi dengan melihat pada pihak ketiga selaku pengelola parkir untuk memetakan potensi masing masing daerah. Dari perhitungan survei potensi tersebut, dishub menjadikannya sebagai acuan penetapan pendapatan lelang parkir di tahun berikutnya. Potensi yang dimiliki kabupaten sukoharjo sebenarnya bisa dikatakan cukup besar, hal itu menjadikan beberapa pihak ikut bermain di sektor parkir. Sehingga tidak semua pendapatan bisa diambil alih menjadi pendapatan daerah karena ada pihak pihak tertentu yang mengatasnamakan lingkungan dan kelompok tertentu yang juga mengambil keuntungan dari sektor parkir. (wawancara tanggal 3 Juli 2018)”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa potensi pendapatan dari sektor parkir yang ada di kabupaten sukoharjo tergolong besar. Disamping itu, luasnya wilayah kabupaten sukoharjo dan terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki dinas perhubungan dalam mengelola lahan parkir menjadikan banyak pihak yang ikut bermain dalam sektor parkir. Akibat dari banyaknya pihak yang ikut bermain adalah banyak bermunculan jukir liar diluar komando dishub atau pengelola serta jukir nakal yang menarik tarif parkir melebihi dari peraturan daerah yang ditetapkan. Dampak dari jukir liar adalah banyak tempat-tempat yang seharusnya tidak ditarik retribusi parkir namun menjadi lahan parkir oleh jukir tanpa ijin dishub. Dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung yaitu juga mempengaruhi pendapatan yang masuk pada kas daerah, ketidakmampuan dishub dalam mengelola besarnya potensi parkir yang

ada di kabupaten sukoharjo membuat penyerapan pendapatan daerah dari sektor parkir tidak maksimal.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Implementasi Kebijakan Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum

- a. Komunikasi antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan lelang dan komunikasi pengelola dengan Dinas Perhubungan.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Agustino (2006:157) menjelaskan komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

1) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan

(*implementor policy*) harus bisa tersampaikan dengan baik. Masalah yang kerap timbul dalam penyaluran komunikasi yaitu miskomunikasi yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga informasi yang akan disampaikan terdirtorsi di tengah jalan.

Proses penyaluran informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Sukoharjo sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan adalah dari Dinas Perhubungan. Berdasarkan penjelasan Ibu Harjanti, beliau menyampaikan bahwa dalam menyikapi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan mengajukan materi kebijakan kepada pemerintah daerah yang tertuang dalam peraturan bupati nomor 54 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (wawancara 5 Juli 2018 di kantor Dinas Lingkungan Hidup). Usulan materi kebijakan tersebut juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagai payung hukum dalam mengelola parkir di tepi jalan umum.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, peneliti melihat bahwa sebagai pembuat sekaligus pelaksana kebijakan, Dinas Perhubungan dapat meminimalisir adanya distorsi informasi dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Informasi terkait lelang disampaikan oleh pimpinan Dinas Perhubungan secara langsung kepada panitia dalam rapat persiapan lelang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alur penyampaian informasi menjadi lebih pendek dan bisa langsung dikomunikasikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Penyampaian informasi juga dilakukan kepada pemenang lelang sebagai pengelola lahan parkir. Proses penyaluran informasi kepada pengelola disebut sosialisasi. Tanggung jawab sosialisasi kepada pengelola adalah UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan, hal itu dikarenakan panitia lelang hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum, oleh karena itu urusan dengan pengelola di lapangan menjadi tanggung jawab UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan. Sosialisasi merupakan agenda bulanan UPTD Perparkiran untuk memberikan informasi tentang aturan yang harus ditaati oleh pengelola dan juru parkir khususnya dalam mengelola lahan parkir. Sosialisasi dilakukan disetiap rayon dan dihadiri oleh pengelola serta jukir yang menjadi karyawannya. Peneliti melihat bahwa sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan disetiap bulannya kepada pengelola merupakan bentuk keseriusan Dinas Perhubungan

untuk menciptakan tata kelola parkir yang baik dari setiap jukir sebagai karyawannya pengelola, disamping itu juga untuk menekankan kepada jukir yang bertugas dilapangan agar selalu mematuhi peraturan dalam mengelola lahan parkir seperti memakai atribut parkir dan memberikan pelayanan parkir sesuai dengan tempat yang disediakan.

2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Penyampaian informasi secara jelas sangat penting untuk meminimalisir kesalahan sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan dan kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri.

Dalam melaksanakan kebijakan lelang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012, Dinas Perhubungan membentuk panitia dari internal UPTD Perparkiran dibantu dengan perwakilan dari Pemerintah Daerah dan Badan Keuangan Daerah. Setiap tahunnya posisi ketua lelang adalah yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan. Informasi yang diberikan ketua lelang kepada panitia disampaikan pada setiap rapat persiapan lelang yang dilaksanakan dua sampai tiga kali sebelum pelaksanaan lelang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dengan melihat bahwa Dinas Perhubungan sebagai pembuat sekaligus pelaksana kebijakan kepada panitia lelang, proses penyaluran informasi dapat dipahami dengan jelas oleh panitia lelang sebagai pelaksana kebijakan. Salah satu panitia lelang yang dapat memahami kebijakan dengan baik adalah Ibu Harjanti sebagai perwakilan dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukoharjo, meskipun beliau bukan merupakan staf pada dinas perhubungan, beliau dapat menjelaskan secara jelas perkara lelang parkir dan mampu untuk melaksanakan kegiatan lelang dengan baik kepada peneliti saat wawancara. Penjelasan yang beliau sampaikan berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi peserta untuk mengikuti proses lelang, peraturan yang harus ditaati panitia dalam melaksanakan proses lelang, serta menjelaskan penyelesaian masalah yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan lelang.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, peneliti melihat bahwa informasi yang diberikan oleh pimpinan dapat diserap dengan baik dan jelas oleh panitia. Pada dasarnya pengetahuan tentang perkara lelang sudah dipahami dengan baik oleh anggota, sehingga informasi yang diberikan pimpinan cenderung pada penegasan informasi dan pengingat kepada panitia.

3) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi tidak hanya menuntut kejelasan tapi juga harus konsisten untuk ditetapkan atau dijalankan. Perintah yang diberikan akan membingungkan pelaksana kebijakan jika tidak konsisten dan berubah-ubah. Rapat sebagai sarana komunikasi yang dibangun pimpinan dalam memberikan arahan dan informasi kepada panitia, dilaksanakan adalah satu sampai dua kali sebelum pelaksanaan lelang. Bapak Joko selaku ketua lelang selalu menekankan tentang tujuan utama dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan bupati agar tidak ada salah persepsi dari panitia nantinya. Sedikitnya intensitas rapat yang dilaksanakan panitia lelang bukan menjadi hambatan dalam penyampaian informasi secara jelas. Staff yang tergabung dalam panitia lelang pada umumnya sama setiap tahunnya, hal ini menjadikan panitia sudah paham tentang pelaksanaan lelang dan pada saat rapat lebih diprioritaskan pembahasan tentang jadwal dan pelaksanaan lelang.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, peneliti melihat bahwa informasi yang disampaikan pimpinan kepada panitia tidak ambigu dan dapat dimengerti dengan baik oleh panitia. Informasi disampaikan ketika rapat dengan intensitas rapat satu sampai dua kali rapat sebelum pelaksanaan lelang. Pembahasan rapat untuk melaksanakan kegiatan lelang disampaikan kepada panitia dalam satu waktu tersebut. Perintah yang diberikan pimpinan tidak diulang diluar agenda rapat karena

pimpinan yakin akan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki anggota.

Konsistensi perintah juga diterapkan pimpinan mulai dari persiapan sampai berakhirnya proses lelang dengan ditanda tangannya berita acara lelang. Perintah yang diberikan pimpinan pada pelaksanaan lelang berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 yang menjadi dasar sekaligus SOP dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu panitia menjadi lebih terarahkan dan terkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan lelang karena perintah yang diberikan pimpinan tidak berdasarkan pada kepentingan pribadi.

- b. Sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, wewenang, informasi dan sarana prasarana Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan

Sumberdaya merupakan syarat yang harus dimiliki oleh suatu organisasi yang mempunyai peranan penting dalam melaksanakan kegiatan. Informasi yang disampaikan pimpinan kepada bawahan untuk menjalankan kebijakan tidak akan bisa terlaksana dengan baik karena tidak didukung dengan sumberdaya yang mencukupi, sehingga implementasi tidak berjalan efektif. Edward III dalam Agustino (2006:158-159) menjelaskan ada 4 indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1) Sumberdaya manusia/Staff

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staff yang tidak cukup memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan staff dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staff dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (berkompeten dan memiliki kapasitas) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan lelang pengelola parkir dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 membutuhkan sumberdaya manusia yang cukup dan mampu untuk menguasai di dalam bidangnya dalam melaksanakan kebijakan lelang, sumberdaya yang dimaksud adalah staff Dinas Perhubungan, staff Pemerintah Daerah dan staff Badan Keuangan Daerah.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab

tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat dan tidak efektif.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang mendukung dalam Implementasi kebijakan lelang parkir dalam peraturan bupati nomor 54 tahun 2012 di Kabupaten Sukoharjo, baik secara administratif maupun secara teknis. Sumberdaya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan lelang pengelola parkir di kabupaten sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a) Kepala dinas perhubungan
- b) Sekretaris dinas perhubungan
- c) Kepala uptd perpajakan
- d) Staff uptd perpajakan (2 orang)
- e) Staff bagian hukum pemerintah daerah kabupaten sukoharjo
- f) Staff bagian pendapatan badan keuangan daerah kabupaten sukoharjo (BKD)

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti, penunjukan staff sebagai panitia tidak secara acak melainkan berdasarkan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki staff serta pengetahuannya tentang perkara lelang. dalam penyajian data disampaikan bahwa Ibu Nanik dan Bapak Waluyo merupakan staff UPTD Perpajakan yang menjadi panitia lelang tahun 2017. Pada tahun-tahun sebelumnya mereka juga ditugaskan menjadi panitia lelang. Dapat dikatakan bahwa staff pada dinas perhubungan memiliki kecakapan dan kemampuan

dalam melaksanakan kebijakan karena sudah berpengalaman melaksanakan kegiatan lelang parkir. pengalaman yang dimiliki staff di tahun-tahun sebelumnya menjadikan staff mengetahui seluk beluk serta problematika yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. berbekal pengalaman dan kecakapan yang dimiliki, kekurangan-kekurangan dalam mengimplementasikan kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dikurangi dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara penunjukan staff pada perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah dari kepala sub bagian (Kasubag) yang menjadi atasannya.

Selama 5 tahun terakhir, jumlah panitia lelang yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan lelang berjumlah tujuh orang. Panitia yang bertugas mengimplementasikan kebijakan juga silih berganti dikarenakan adanya rotasi staff ke instansi lain atas perintah pemerintah daerah. Pergantian anggota pada panitia lelang bukan menjadi masalah yang serius bagi dinas perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan lelang. meskipun ada pergantian susunan panitia lelang, kegiatan lelang parkir dapat diimplementasikan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan kelancaran kegiatan lelang yang dilaksanakan serta pendapatan dari sektor parkir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti yang sudah dijelaskan dilatar belakang.

2) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan mengalami penurunan saat wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau kelompoknya.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti, kewenangan yang dimiliki panitia lelang sebagai implementor kebijakan berasal dari Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala dinas perhubungan. SK tersebut berisi tentang pembentukan panitia lelang untuk melaksanakan kegiatan lelang sesuai dengan peraturan bupati nomor 54 tahun 2012.

Dalam SK yang dikeluarkan oleh kepala dinas, terdapat dua anggota panitia yang berasal dari luar SKPD Dinas Perhubungan yaitu dari bagian hukum pemerintahan daerah 1 orang dan dari bagian pendapatan badan keuangan daerah 1 orang. Perwakilan yang menjadi

panitia lelang pada dasarnya mempunyai tugas pokok sebagai panitia lelang, namun mereka juga memiliki tugas khusus dalam kepanitiaan. Bapak Joko selaku ketua panitia menjelaskan, perwakilan staff dari bagian hukum pemerintah daerah mempunyai tugas khusus yaitu berkaitan dengan hukum yang mendasari kegiatan lelang. Melihat apakah proses lelang yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur dan memastikan tidak ada peraturan/kebijakan yang dilanggar. Sedangkan perwakilan staff dari bagian pendapatan BKD mempunyai tugas khusus yaitu sebagai konsultan nilai lahan parkir yang akan dilelangkan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan, peneliti melihat bahwa pendelegasian wewenang dari kepala dinas perhubungan kepada panitia dalam mengimplementasikan kebijakan melalui SK yang dikeluarkan, adalah salah satu bentuk pendelegasian wewenang secara formal dan memiliki legitimasi yang kuat bagi panitia sebagai pelaksana kebijakan, berikut pembagian wewenang dalam panitia lelang:

Tabel 9. Pembagian wewenang panitia lelang parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Susuna Panitia	Instansi/Jabatan	wewenang
Penasehat	Dinas Perhubungan/Kepala Dinas Perhubungan	Mengawasi proses kegiatan lelang

Ketua pelaksana	Dinas Perhubungan/Sekretaris Dinas Perhubungan	Bertanggung jawab atas panitia dan pelaksanaan lelang
Sekretaris pelaksana	Dinas Perhubungan/Kepala UPTD Perparkiran	Bertanggung jawab atas pengadministrasian kegiatan lelang
Anggota	Dinas Perhubungan/Staff UPTD Perparkiran	Pengumpulan dan verifikasi berkas peserta, pelaksanaan lelang di lapangan
Anggota	Pemerintah Daerah/Staff Bagian Hukum	Pengawasan kegiatan sesuai hukum, dan pelaksanaan lelang di lapangan
Anggota	Badan Keuangan Daerah/Staff Bagian Pendapatan	Konsultan dalam penentuan nilai lelang, pelaksanaan lelang di lapangan

Sumber: data olahan peneliti

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pembagian wewenang panitia lelang dari setiap anggota berdasarkan instansi dan jabatan

strukturalnya. Semua panitia bertanggung jawab untuk melaksanakan proses kegiatan lelang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, disamping itu setiap panitia juga mempunyai tugas khusus berdasarkan status keanggotaannya dalam panitia.

3) Informasi

Informasi merupakan sumberdaya yang penting bagi pelaksana kebijakan. Tanpa adanya informasi yang diterima oleh seorang implementor, kebijakan tidak akan berjalan efektif. Menurut Edward III informasi dalam implementasi kebijakan, mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang bagaimana cara melaksanakan kebijakan lelang pengelola parkir tertuang dalam peraturan bupati nomor 54 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Setiap panitia lelang diharuskan oleh pimpinan untuk memahami isi peraturan

tersebut, karena Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 juga menjadi landasan bagi Dinas Perhubungan untuk melaksanakan lelang pengelola parkir. Penekanan informasi yang diberikan pimpinan, disampaikan dalam rapat persiapan lelang. setiap informasi yang diberikan, disampaikan secara langsung kepada panitia dan tidak pernah pimpinan memberikan informasi melalui media sosial atau melalui handphone (Hp). Dalam peraturan bupati nomor 54 tahun 2012 telah dijelaskan tentang tata cara parkir dan SOP dalam menjalankan kegiatan lelang. Disamping itu, pimpinan juga menekankan bahwa panitia adalah netral, tidak berpihak kepada sasaran dan pihak yang berkepentingan. Hal ini merupakan salah satu kepatuhan yang harus ditaati oleh anggota sebagai pelaksana kebijakan. Kebijakan yang dijalankan adalah untuk menciptakan pengelolaan parkir yang baik dan mampu memaksimalkan pendapatan dari sektor parkir. Bapak Joko menjelaskan bahwa salah satu cara untuk melihat bagus tidaknya suatu kota adalah dengan melihat penataan parkirnya, penataan parkir yang baik dapat mengurangi kemacetan dan terlihat lebih rapi (wawancara tanggal 3 Juli 2017 di Kantor Dinas Perhubungan). Dengan demikian, penyampaian informasi yang diberikan kepada panitia selaku pelaksana kebijakan telah tersampaikan secara menyeluruh tentang etika dan aturan dalam melaksanakan kebijakan dengan bertatap muka secara langsung.

4) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana menurut merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya sarana dan prasarana pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sarana dan prasarana diperlukan untuk menterjemah usul-usul di atas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sarana dapat berupa alat/perlengkapan dan kendaraan. Pengadaan prasarana yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan lelang, dinas perhubungan memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan kebijakan. Sarana yang dimiliki antara lain papan tulis dan spidol, TOA, LCD proyektor, peralatan tulis, serta kotak penawaran lelang. Sedangkan prasarana yang dimiliki antara lain tanah dan bangunan kantor dinas perhubungan. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2017 pelaksanaan lelang bertempat di ruang rapat dinas perhubungan, sedangkan pada tahun sebelumnya (tahun 2012-2016) pelaksanaan lelang menyewa tempat di rumah makan yang berada tepat di depan kantor dinas perhubungan. hal itu dikarenakan pada tahun 2012-2016

dinas perhubungan belum memiliki ruang rapat yang mendukung untuk pelaksanaan lelang sehingga lokasi pelaksanaan lelang harus dialokasikan ke tempat lain.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti, meskipun pada tahun 2012-2016 pelaksanaan lelang parkir bertempat di rumah makan karena keterbatasan ruang di dinas perhubungan, hal itu bukan menjadi masalah yang berarti. Mengingat bahwa lokasi rumah makan berada di depan kantor dinas perhubungan sehingga mobilisasi dan pengawasan masih dapat dikontrol dengan baik oleh panitia. Pada tahun 2017 telah dibangun gedung baru sebagai tempat pertemuan dan rapat di kantor dinas perhubungan, gedung tersebut juga mencukupi untuk melaksanakan lelang sehingga pada tahun 2017 dinas perhubungan mempunyai prasarana sendiri untuk melaksanakan lelang parkir di tepi jalan umum. Sarana yang dimiliki dinas perhubungan untuk melaksanakan lelang parkir juga dalam kondisi baik dan terawat, hal itu dibuktikan bahwa sarana yang digunakan selama beberapa tahun terakhir masih bisa digunakan pada pelaksanaan lelang tahun 2017 yang lalu.

- c. Disposisi atau ketersediaan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Menurut Edward III kecenderungan

dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa dilaksanakan dengan efektif. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap yang baik dan antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh panitia dalam melaksanakan kegiatan lelang. Bapak Waluyo dan Ibu Nanik adalah staff UPTD Perparkiran yang sudah menjadi panitia lelang selama kurang

lebih tiga kali. Kepercayaan yang diberikan kepala dinas kepada mereka bukan hanya melihat pada kemampuan dan kompetensi yang mereka miliki, namun semangat serta sikap yang baik juga mereka prioritaskan selama menjadi panitia lelang. Hal itu juga disampaikan Bapak Joko bahwa panitia yang bertugas menjadi pelaksana lelang semuanya mempunyai perilaku yang baik sebagai seorang staff dan birokrat pemerintah. Hal itu merupakan kunci dari setiap keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan. Tanpa semangat yang tinggi dan itikad baik dari pegawai, mustahil kebijakan-kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan termasuk didalamnya kebijakan lelang pengelola parkir dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu Harjanti sebagai perwakilan anggota panitia dari pemerintah daerah juga memiliki disposisi yang kuat dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitia lelang. Semangat serta kemauan yang tinggi beliau hadirkan disetiap agenda kegiatan lelang yang dilaksanakan. Dalam sela-sela kesibukannya, beliau juga menyempatkan untuk sharing dengan atasannya yaitu Kepala Sub Bagian Hukum di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang lelang parkir dan penyelesaian masalah-masalah yang mungkin terjadi.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, peneliti melihat bahwa staff yang tergabung dalam panitia lelang dinas perhubungan memiliki kemauan serta antusiasme yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum.

- d. Struktur birokrasi Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan lelang parkir sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP).

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III terdapat 2 karakteristik utama dari birokrasi, yaitu Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.

1) *Standard Operational Procedure* (SOP)

Edward III menjelaskan bahwa SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum di berbagai sektor publik dan

swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan aturan.

Aturan yang menjadi SOP bagi panitia lelang dalam melaksanakan kegiatan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum adalah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut telah dijabarkan secara rinci tidak hanya tentang bagaimana lelang dilaksanakan, namun juga syarat-syarat dari calon pengelola sebagai sasaran kebijakan dan mekanisme pelaksanaan lelang seperti yang telah dijabarkan di penyajian data.

Dalam peraturan bupati nomor 54 tahun 2012 dijelaskan bahwa sasaran dari pelaksanaan lelang adalah pihak ketiga yaitu orang pribadi bukan pegawai negeri sipil (PNS)/TNI/Polri maupun badan usaha dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ibu Harjanti selaku anggota panitia lelang menjelaskan bahwa pada awal tahun dibentuknya peraturan bupati tersebut orang pribadi/perseorangan diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan lelang parkir. Namun ada beberapa masalah yang tidak disebutkan sehingga pada saat ibu Harjanti menjadi panitia lelang, dengan pertimbangan bersama kepala dinas akhirnya dibuat aturan panitia bahwa perseorangan tidak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai peserta lelang (wawancara 5

Juli 2017 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup). Kemudian pada tahun 2017, Bapak Joko selaku ketua panitia melihat bahwa potensi dari sektor parkir harus dimaksimalkan disamping itu juga dibutuhkan pengelola yang mencukupi untuk mengelola rayon parkir yang dilelangkan (wawancara 3 Juli 2017 di kantor Dinas Perhubungan). Oleh karena itu kebijakan dikembalikan pada peraturan bupati nomor 54 tahun 2012 bahwa orang pribadi bisa mendaftarkan diri sebagai peserta lelang parkir.

Setiap peserta lelang yang mendaftarkan diri harus mengumpulkan berkas-berkas yang menjadi syarat peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang untuk diverifikasi oleh panitia. Panitia dengan tegas akan menolak pendaftaran peserta jika berkas yang dikumpulkan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kualifikasi pendaftar. Setelah peserta dinyatakan lolos kualifikasi berkas oleh panitia, peserta dapat mengikuti proses lelang yang akan dilaksanakan.

Pada hari H pelaksanaan lelang, sistem yang diterapkan panitia dalam proses lelang adalah peserta akan memasukkan amplop yang berisi rayon yang dipilih serta nominal yang ditawarkan oleh peserta kedalam kotak penawaran. Peserta dengan penawaran tertinggi pada rayon yang dipilih, dinyatakan sebagai pemenang lelang pada rayon tersebut. Setelah proses lelang berakhir dan seluruh rayon telah memiliki pengelola masing-masing, maka masa kerja panitia lelang

akan berakhir dengan ditanda tangannya berita acara evaluasi pelaksanaan lelang.

Gambar 6
Pelaksanaan Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum di
Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018



Sumber: Dinas Perhubungan

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan gap yang terjadi dalam proses pelaksanaan lelang parkir yang dilaksanakan oleh panitia dinas perhubungan. Dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 yang menjadi acuan dalam melaksanakan lelang, tidak ada peraturan/kebijakan dari pemerintah pusat yang menjadi rujukan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 dalam membuat SOP dan melaksanakan lelang parkir. Peraturan yang menjadi rujukan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 yang berkaitan dengan parkir adalah UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Pemerintah Daerah memang

memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri daerah nya, hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Akan tetapi peraturan pemerintah yang menjadi landasan dinas perhubungan tersebut dalam melelangkan pengelolaan parkir di tepi jalan umum kepada pihak ketiga belum kuat.

Langkah dinas perhubungan dalam membuat kesepakatan kepada pihak ketiga untuk mengelola parkir di tepi jalan umum merupakan bentuk kerjasama daerah. Bapak Joko selaku ketua panitia lelang tahun 2017 juga menjelaskan bahwa dilibatkannya pihak ketiga untuk membantu urusan pemerintah daerah dalam hal ini adalah pengelolaan parkir di tepi jalan umum, termasuk dalam bentuk kerjasama daerah (wawancara 3 Juli 2017 di kantor Dinas Perhubungan). Oleh karenanya, peraturan yang tepat untuk dijadikan dasar dan acuan oleh dinas perhubungan dalam melaksanakan kebijakan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Untuk memperkuat analisis ini, peneliti mengambil contoh bahwa di Kabupaten Cilacap melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola lahan parkir di tepi jalan umum

menggunakan PP Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah sebagai dasar kerjasama yang dilakukan. Dikutip dari <http://www.cilacapkab.go.id> website resmi Pemerintah Kabupaten Cilacap, pada pertengahan tahun 2017 pelaksanaan lelang pengelola parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sempat gagal dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena jumlah peserta yang mengikuti lelang tidak memenuhi kuota. Bapak Masikin Jafar selaku kepala UPT Perparkiran pada Dinas Perhubungan Cilacap menjelaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang kerjasama daerah, lelang harus diikuti oleh setidaknya 5 perusahaan yang telah berbadan hukum PT. Namun hingga batas akhir yang ditentukan, lelang prakualifikasi hanya diikuti kurang dari 5 peserta dan semuanya badan usaha berbentuk CV. Kemudian pada akhir tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap melaksanakan lelang ulang terkait pengelolaan lahan parkir ditepi jalan umum, dan pada tanggal 27 Desember 2017 ditandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Mitra Berkah Illahi dan PT Sarana Mekar persada sebagai mitra resmi dinas perhubungan dalam mengelola lahan parkir. Saat dikonfirmasi oleh peneliti, Bapak Ari selaku staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap memang menggunakan Permendagri Nomor 22

Tahun 2009 dan PP Nomor 50 Tahun 2007 sebagai dasar kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola parkir (konfirmasi by email dan Whatsapp).

Tatacara kerjasama daerah yang termuat dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan
- 2) Penawaran
- 3) Penyiapan kesepakatan
- 4) Penyiapan perjanjian
- 5) Penandatanganan perjanjian, dan
- 6) Pelaksanaan

Point-point yang dijelaskan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang mekanisme/tatacara kerjasama daerah pada umumnya sudah sesuai dengan tatacara lelang dalam Perbup Sukoharjo Nomor 54 tahun 2012. Sehingga alur/proses pelaksanaan lelang sudah dilaksanakan dengan benar oleh panitia. Akan tetapi dalam PP Nomor 50 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 2009 sama-sama menekankan bahwa kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), dan badan hukum. Badan hukum adalah perusahaan swasta, BUMN, BUMD, Koperasi, Yayasan, dan lembaga didalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kerjasama yang dilakukan Dinas Perhubungan selama mengelola lahan parkir di tepi jalan umum (tahun anggaran 2013 s/d 2018) adalah dengan perseorangan dan badan usaha yang berbentuk Perseroan Komanditer (CV). CV merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bukan badan hukum yang diatur dalam buku pertama, titel ketiga, bagian kedua pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan analisis peneliti, mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009, maka semestinya Dinas Perhubungan tidak melakukan kerjasama dengan perseorangan dan badan usaha yang berbentuk CV dalam mengelola lahan parkir di tepi jalan umum karena tidak sesuai dengan amanat peraturan pemerintah pusat.

2) Fragmentasi

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi.

Kebijakan lelang yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan melibatkan instansi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukoharjo

dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo. Setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kebijakan lelang, mengirimkan perwakilan staff untuk menjadi bagian dalam panitia lelang yang dibentuk oleh kepala Dinas Perhubungan. Staff yang dikirimkan OPD dalam panitia lelang mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus mewakili OPD masing-masing. Sehingga tidak ada tumpang tindih tugas dan kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif.

Koordinasi antara panitia dalam mengimplementasikan kebijakan adalah pada saat rapat persiapan acara lelang. Dalam rapat persiapan tersebut ketua panitia menjelaskan maksud dan tujuan dilibatkannya Pemda dan BKD Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan kebijakan lelang parkir di tepi jalan umum. Ketua panitia dalam menjelaskan keterlibatan OPD yang terlibat adalah menekankan satu tujuan dan pandangan dalam mengimplementasikan kebijakan lelang parkir sehingga otoritas yang dimiliki ketua lelang tidak lemah dan terpecah karena panitia terbagi dalam OPD yang berbeda-beda, sehingga panitia dapat bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dengan satu arahan dari pimpinan.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, peneliti melihat proses koordinasi yang dijalankan oleh pimpinan panitia lelang sudah baik. Penyebaran tanggung jawab dengan OPD yang terlibat dapat

dihandle oleh pimpinan tanpa mengurangi esensi dan menghambat tujuan dari pelaksanaan kebijakan.

2. Faktor pendukung dan penghambat

- a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Sukoharjo

- 1) Kemampuan Sumberdaya

Semua organisasi baik organisasi lembaga publik maupun organisasi perusahaan bisnis, memiliki ciri-ciri organisasi yang sama yaitu suatu bentuk kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu terdiri atas unsur-unsur individu, kelompok dan struktur organisasi, yang berbeda hanya pada tujuan organisasi yang ingin dicapai. Dari unsur manusianya baik pimpinan, staf pegawai maupun aparatur semuanya diperlukan persyaratan adanya kemampuan kerja (*abilities, capabilities, skills*) untuk kinerja bidang-bidang tugas yang dipercayakan. Kemampuan kerja tersebut dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan kebijakan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan kebijakan lelang lahan parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan selama 3 tahun terakhir berjalan dengan baik. Target yang ditetapkan oleh panitia dapat terpenuhi. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan lelang adalah kemampuan kerja panitia lelang. Penunjukan staff untuk menjadi

panitia lelang dilakukan oleh pimpinan dinas perhubungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki staff. Sebagai contoh, Ibu Nanik dan Bapak Waluyo merupakan staff UPTD Perpustakaan yang sudah lebih dari 3 tahun dipercaya menjadi panitia lelang karena kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki dalam perkara lelang. Ibu Harjanti selaku anggota panitia lelang juga menjelaskan bahwa staff yang dimiliki Dinas Perhubungan yang menjadi panitia lelang tentunya lebih paham akan persoalan lelang, karena kebijakan lelang merupakan agenda tahunan Dinas Perhubungan selama lebih dari 5 tahun (wawancara 5 Juli 2017 di kantor Dinas Lingkungan Hidup).

2) Dukungan Pimpinan

Untuk menciptakan keberhasilan kebijakan yang dibuat tidak cukup hanya mengandalkan sumberdaya yang ada. Keikutsertaan pemimpin dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap semangat dan loyalitas pelaksana untuk mencapai target yang ditetapkan. Target yang besar wajib mendapatkan bantuan dan dukungan tim kerja yang solid. Oleh karena itu, pemimpin harus bisa menempatkan diri dalam sebagai seorang motivator dan influencer yang baik bagi tim kerja agar setiap pelaksana termotivasi secara ikhlas, sukarela, maupun terpaksa, membentuk kebiasaan kerja yang baik dalam bekerjasama.

Dukungan pemimpin dalam kepanitiaan lelang di dinas perhubungan ditunjukkan oleh ketua panitia lelang pada saat rapat dan pelaksanaan lelang. Bapak Joko selaku ketua panitia lelang selalu memberikan arahan kepada panitia dalam setiap rapat. Arahan yang diberikan menekankan kepada anggota agar bekerja secara maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam setiap kesempatan, Bapak Joko juga selalu berkoordinasi dengan Bapak Marjono selaku sekretaris panitia sekaligus kepala UPTD Perparkiran diluar agenda rapat. Ibu Harjanti juga menjelaskan bahwa dalam setiap rapat, Bapak Joko selalu memberikan arahan kepada panitia untuk melaksanakan kegiatan lelang dengan sebaik-baiknya. Meskipun intensitas rapat hanya dilakukan 1-2 kali, akan tetapi kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ketua panita untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada anggota dengan sebaik-baiknya.

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Sukoharjo

1) Peserta lelang

Pihak ketiga sebagai calon mitra dinas perhubungan dalam mengelola lahan parkir di tepi jalan umum merupakan sasaran utama dari kebijakan lelang. Keikutsertaan pihak ketiga sebagai peserta lelang sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan lelang dalam

mengelola lahan parkir di tepi jalan umum. semakin banyak pihak-pihak yang ikut serta dalam lelang yang diselenggarakan oleh dinas perhubungan, maka semua daerah/rayon akan dapat terkelola dengan baik serta pada saat proses penawaran akan terjadi persaingan dalam penawaran rayon parkir sehingga target limit nominal rayon yang dilelangkan dapat memenuhi target bahkan lebih. Akan tetapi tidak semua pihak dapat mengikuti proses lelang dan mendaftarkan diri sebagai peserta.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 telah diatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dan dalam pelaksanaannya peserta harus mengumpulkan berkas-berkas yang menjadi syarat untuk mengikuti proses lelang parkir. Sejak tahun 2013 pengelola yang menjadi mitra/rekanan dinas perhubungan dalam mengelola lahan parkir di tepi jalan umum adalah perseorangan dan badan usaha yang berbentuk CV. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa instansi pemerintah tidak bisa bekerjasama dengan perseorangan/badan usaha berbentuk CV.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, peneliti melihat bahwa penyebaran informasi yang dilakukan panitia kurang efektif. Pasalnya informasi terkait lelang parkir adalah dengan penempelan informasi lelang di papan pengumuman kantor dinas perhubungan dan lewat radio lokal kabupaten sukoharjo. Penyebaran informasi yang dilakukan panitia membuat jangkauan penyebaran informasi lelang juga terbatas.

Sehingga tidak banyak pihak yang mengetahui jika Dinas Perhubungan akan melaksanakan lelang parkir. Penyebaran informasi lelang semestinya dilakukan dengan maksimal, dikemas dalam bentuk dan informasi yang menarik dengan memaksimalkan media sosial yang ada (instagram/facebook/twitter) serta website yang dimiliki Dinas Perhubungan dan website Kabupaten Sukoharjo. Sehingga informasi dapat tersampaikan kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran yang memenuhi kriteria untuk menjadi mitra dinas perhubungan dalam mengelola lahan parkir di tepi jalan umum.

2) Tekanan dari pihak yang berkepentingan

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tidak lepas dari hambatan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan bisa berupa kelompok/perorangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap kebijakan yang dijalankan, sehingga akan berpengaruh pada capaian keberhasilan kebijakan. Bapak Joko selaku ketua panitia lelang menjelaskan bahwa potensi yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo dalam sektor parkir tergolong besar, berdasarkan survei potensi yang dilakukan panitia, pendapatan dapat menyentuh angka 2 milyar (wawancara 3 Juli 2018 di kantor Dinas Perhubungan). Besarnya nilai potensi tersebut juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi (sepeda motor dan mobil).

Dinas perhubungan sebagai penanggung jawab pengelolaan lahan parkir di tepi jalan umum, belum bisa menyerap besarnya potensi tersebut. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Kabupaten Sukoharjo dan minimnya jumlah staff yang dimiliki Dinas Perhubungan yang berjumlah tujuh orang dalam mengelola lahan parkir di tepi jalan umum secara mandiri. Potensi parkir, merupakan tempat-tempat yang berpotensi untuk dijadikan lahan parkir secara resmi oleh dinas perhubungan. Potensi parkir di tepi jalan umum munculnya diawali dari lingkungan, dimana lingkungan yang mulai terdapat parkir, kemudian dari lingkungan setempat muncul pihak yang mengelola dan pihak pertama yang mengelola inilah yang menjadikan tempat parkir berkembang menjadi ramai yang kemudian dipandang oleh Dinas Perhubungan sebagai potensi parkir.

Potensi dari sektor parkir di Kabupaten Sukoharjo belum terserap dengan maksimal. Pihak-pihak yang mengatasnamakan lingkungan dan kelompok tertentu menjadi hambatan bagi dinas dalam memaksimalkan besarnya potensi dari sektor parkir. Usaha yang telah dilakukan dinas perhubungan adalah menemui pihak-pihak yang mengelola parkir ditepi jalan umum untuk menjalin kontrak dengan dinas perhubungan agar mereka mau berbagi retribusi kepada pemerintah, akan tetapi tidak semua pihak mau untuk bekerjasama dengan dinas perhubungan dan tetap mengelola parkir tanpa terikat dengan pemerintah. Akibatnya banyak tempat-tempat parkir yang seharusnya tidak ditarik retribusi

parkir, menjadi lahan parkir oleh jukir liar tanpa pengawasan dari dinas perhubungan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, peneliti melihat bahwa pihak-pihak yang ikut bermain di sektor parkir menjadi hambatan dinas perhubungan dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Keberadaan jukir liar juga dinilai meresahkan warga, pasalnya tarif parkir yang diminta melebihi aturan pemerintah daerah yang ditetapkan, selain itu banyak tempat-tempat yang seharusnya bukan menjadi tempat parkir akan tetapi menjadi lahan parkir jukir liar. Dinas perhubungan telah mengupayakan penertiban jukir liar dengan mengadakan sidang dadakan (sidak) gabungan dengan bantuan satpol PP dan Polisi setiap satu bulan sekali ke setiap daerah. Jukir liar yang terjaring sidak oleh Dinas Perhubungan akan diberikan surat pernyataan kemudian diarahkan untuk mendaftar di kantor untuk dibuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) jukir agar kedepannya jumlah jukir liar berkurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Otonomi daerah merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah tentang perpajakan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perhubungan melakukan lelang parkir untuk meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Sukoharjo. Dinas Perhubungan melimpahkan wewenang pengelolaan lahan parkir di tepi jalan umum kepada pihak ketiga dengan sistem lelang. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan dasar dan landasan Dinas Perhubungan dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD sektor parkir melalui sistem lelang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menggunakan teori Edward III dalam melihat implementasi kebijakan lelang parkir dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Komunikasi antar aktor dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 berkaitan dengan pelaksanaan lelang parkir di tepi jalan umum terdiri dari komunikasi panitia lelang dengan panitia lelang, serta

komunikasi UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan dengan pihak ketiga sebagai pengelola parkir. Dinas Perhubungan merupakan pembuat sekaligus pelaksana kebijakan lelang parkir dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa alur penyampaian informasi yang diberikan oleh pimpinan Dinas Perhubungan kepada panitia lelang menjadi lebih pendek sehingga distorsi penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dapat diminimalisir. Penyampaian informasi kepada pengelola dilakukan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan melalui agenda sosialisasi setiap bulan ke setiap daerah/rayon dengan dihadiri oleh pengelola rayon serta juru parkir yang menjadi karyawan pengelola. Informasi yang disampaikan Dinas Perhubungan, berkaitan dengan aturan-aturan yang harus ditaati oleh pengelola dan juru parkir dalam mengelola lahan parkir untuk menciptakan tata kelola parkir yang baik dan rapi.

2. Sumber daya dalam implementasi kebijakan lelang parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terdiri dari panitia pelaksana/sumberdaya manusia, wewenang, informasi, serta sarana dan prasarana. Panitia lelang merupakan pelaksana kebijakan lelang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan yang berjumlah 7 orang, terdiri dari 5 orang internal Dinas Perhubungan, 1 orang perwakilan dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dan 1 orang perwakilan dari Bagian Pendapatan Badan Keuangan Daerah. Wewenang yang menjadi legal formal panitia lelang adalah Surat Keputusan (SK) yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012. Informasi mengenai pelaksanaan lelang dan pengelolaan parkir di tepi jalan umum dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012. Pimpinan kepala Dinas Perhubungan selalu menekankan panitia untuk meninjau dan memahami kembali isi dari Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 pada setiap rapat persiapan serta memberikan informasi-informasi tambahan mengenai lelang yang dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan lelang parkir sudah terpenuhi. Sarana yang dimiliki antara lain 1 buah kotak penawaran, peralatan tulis, papan tulis, spidol, LCD Proyektor, dan TOA. Pelaksanaan lelang sebelum tahun 2017 bertempat di rumah makan yang berlokasi di depan kantor Dinas Perhubungan karena Dinas Perhubungan tidak memiliki tempat yang mencukupi untuk pelaksanaan lelang. Pada tahun 2017 telah diselesaikan pembangunan gedung baru untuk rapat dan pertemuan di Dinas Perhubungan, sehingga pada tahun 2017 pelaksanaan lelang bertempat di gedung baru tersebut karena mencukupi untuk pelaksanaan lelang lahan parkir di tepi jalan umum.

3. Disposisi yang merupakan sikap dan ketersediaan dari pelaksana kebijakan, telah ditunjukkan dengan semangat dan antusiasme yang tinggi dari panitia lelang. Hal ini dibuktikan bahwa pelaksanaan lelang dapat berjalan dengan lancar, minimnya kesalahan yang dibuat oleh panitia, serta

semangat dalam memahami perkara lelang dan menjalankan tugas sebagai panitia lelang.

4. Struktur Birokrasi berkaitan dengan Standard Operatinal Procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP yang menjadi dasar dan landasan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kebijakan lelang parkir adalah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012. Peneliti melihat bahwa SOP pelaksanaan lelang dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 berkaitan dengan pihak yang dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah.
5. Implementasi kebijakan lelang dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan analisis peneliti, faktor pendukung pelaksanaan lelang parkir adalah kemampuan/skill yang dimiliki panitia lelang berupa pengalaman dan pengetahuan tentang lelang dan parkir serta dukungan yang diberikan pimpinan kepada panitia. Faktor penghambat pelaksanaan lelang parkir adalah minimnya peserta, yaitu pihak ketiga yang memenuhi kriteria sebagai calon mitra Dinas Perhubungan dalam mengelola lahan parkir di tepi jalan umum. Serta hambatan dari pihak yang berkepentingan yaitu individu/golongan yang mengatasnamakan kelompok dan lingkungan yang tidak terikat dengan Dinas Perhubungan dalam mengelola lahan parkir di tepi jalan umum.

B. Saran

1. Perlu dilakukan peninjauan kembali terkait Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang SOP dalam melaksanakan kebijakan lelang lahan parkir di tepi jalan umum dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 terkait kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
2. Untuk menjaring pihak ketiga yang memenuhi kriteria sebagai calon mitra dalam mengelola lahan parkir di tepi jalan umum, perlu dilakukan inventarisasi peserta yang memenuhi syarat sebagai pengelola dan dipastikan tidak masuk dalam blacklist bank. Serta memaksimalkan penyebaran informasi/iklan terkait lelang, tidak hanya ditempel pada papan pengumuman di Dinas Perhubungan dan penyiaran melalui radio lokal, tetapi juga disebarluaskan melalui media sosial lainnya seperti, twitter, facebook website resmi Dinas Perhubungan, dan website resmi Kabupaten Sukoharjo.
3. Untuk menciptakan tata kelola parkir di tepi jalan umum yang baik, diperlukan adanya interpretasi potensi parkir pada saat survei potensi lahan parkir. Interpretasi melihat pada lebar jalan serta seberapa besar lahan parkir mampu menampung kendaraan yang hendak parkir. Hal ini sekaligus untuk mengantisipasi penggunaan parkir diluar lahan parkir yang telah ditentukan sehingga menyebabkan kemacetan/parkir yang tidak rapi karena ketidakteraturan parkir yang disebabkan oleh ketidakmampuan lahan parkir menampung kendaraan yang hendak parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- AG, Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Brotodihardjo, Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco
- <http://portal.sukoharjokab.go.id/sejarah-sukoharjo/> (diakses tanggal 26 Mei 2018)
- <https://sukoharjokab.bps.go.id/statictable/2015/03/11/16/luas-wilayah-menurut-kecamatan.html> (diakses tanggal 26 Mei 2018)
- Hilaliyah, Nur. “Gambaran Wilayah Kabupaten Sukoharjo” <https://www.slideshare.net/HilaliyahSamhari/gambaran-wilayah-kabupaten-sukoharjo> (diakses tanggal 26 Mei 2018)
- Kehidupan, Aula. “Sekilas Tentang Lelang”. http://aulakehidupan.blogspot.co.id/2012/01/sekilas-tentang-lelang_17.html (diakses tanggal 15 januari 2018)
- Kurniawan, dkk. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Lumainsteivan.”Definisi Kebijakan Publik”. <https://lumainsteivan.wordpress.com/2013/09/30/definisi-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/> (diakses tanggal 25 mei 2018)
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Manurung, Mandala (et al). 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan perkembangannya*. Jakarta: UI-Press.
- Muluk, Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia
- Moleong, Lexy J., (2001). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Mathew B., Huberman, A.M, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook*, Edition 3.USA: Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi,UI-Press.

- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor. Ghalia Indonesia
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prima. "Implementasi Kebijakan Publik". <https://primallifejournal.wordpress.com/2013/02/25/implementasi-kebijakan-publik-2/> (diakses tanggal 20 Januari 2018)
- Suparmoko. 1974. *Azas-azas Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPEE UGM
- Sukidin, Damai Darmadi. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudiono, A. 2001. *Pemasaran Pertanian*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Suparmoko. 1974. *Azas-azas Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPEE UGM
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tugas Sekolah. "Ciri-Ciri Kebijaksanaan Negara". <http://www.tugassekolah.com/2017/03/4-ciri-kebijaksanaan-negara-yang.html> (diakses tanggal 25 mei 2018)
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Pressindo. Edisi pertama
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Wicaksono, Bayu. "PKL Alun-alun Sukoharjo Keluhkan Penataan Parkir".
<https://www.jawapos.com/radarsolo/read/2018/01/12/39860/pkl-alun-alun-sukoharjo-keluhkan-penataan-parkir> (diakses tanggal 20 Januari 2018)
- Widjaja, H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yulianti. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN

